



**MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN  
GUNA MENCEGAH INTOLERANSI DI MASYARAKAT**

Oleh:

**TATANG SUBARNA**

---

**KOLONEL INF. NRP. 11930072160769**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2020**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

## KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Memperkuat Komitmen Kebangsaan Guna Mencegah Intoleransi di Masyarakat”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXI Tahun 2020 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Marsda TNI (Purn) Dwi Djatmiko S.B., S.E., M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

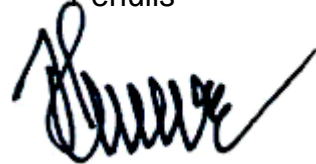
Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Penulis



Tatang Subarna

Kolonel Inf. NRP. 11930072160769



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatang Subarna  
Pangkat : Kolonel Inf  
Jabatan : Paban IV / Binwatpers Spersad  
Instansi : TNI AD  
Alamat : Perum Korpri RT 02 RW 05 Desa Sayang, Kecamatan  
Jatinangor, Kabupaten Sumedang – Jawa Barat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, 1 Oktober 2020

Penulis Taskap

Tatang Subarna  
Kolonel Inf. NRP. 11930072160769

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI / PERBAIKAN  
PPRA LXI / 2020

Nama Peserta : TATANG SUBARNA

Judul Taskap : MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN GUNA  
MENCEGAH INTOLERANSI DI MASYARAKAT

Taskap tersebut di atas telah direvisi/diperbaiki sesuai masukan dari penguji Taskap, materi yang sudah disempurnakan meliputi :

1. Pada Bab I (Latar Belakang), salah ketik/tipo pada halaman 5 baris ke-5 dari bawah, yang semula “Penguatan intoleransi ....” telah diperbaiki menjadi “Penguatan toleransi ....”
2. Pada Bab IV (Simpulan), uraian pada simpulan telah diperbaiki urutannya sesuai dengan skala prioritas yaitu ketimpangan sosial, penegakan hukum, kepentingan politik tertentu, dan globalisasi.
3. Pada Bab IV (Rekomendasi), urutan pada rekomendasi telah disesuaikan dengan urutan pada simpulan (sesuai skala prioritas) dan telah diberikan rekomendasi yang konkret (siap dilaksanakan).
4. Pada Bab IV (Rekomendasi) juga telah ditambahkan rekomendasi tentang usulan pembatalan berbagai Perda diskriminatif agar budaya toleransi tetap tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Demikian pengesahan perbaikan Taskap dinyatakan telah memenuhi syarat.

Jakarta, Oktober 2020

Tutor Taskap

Ketua Tim  
Penguji Taskap

Dwi Djatmiko S.B., S.E., M.M.  
Marsekal Muda TNI (Purn)

Prof. Dr. Sudaryono, S.U.  
Pembina Utama Madya (IV/d)

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	7
5. Metode dan Pendekatan .....	9
6. Pengertian .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	11
8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	11
9. Kerangka Teoritis .....	14
10. Data dan Fakta .....	18
11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis .....	22
<b>BAB III   PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	33

13. Mengantisipasi Pengaruh Globalisasi .....	33
14. Meningkatkan Penegakan Hukum .....	40
15. Menghilangkan Ketimpangan Sosial .....	46
16. Menghilangkan Kepentingan Politik Tertentu .....	50

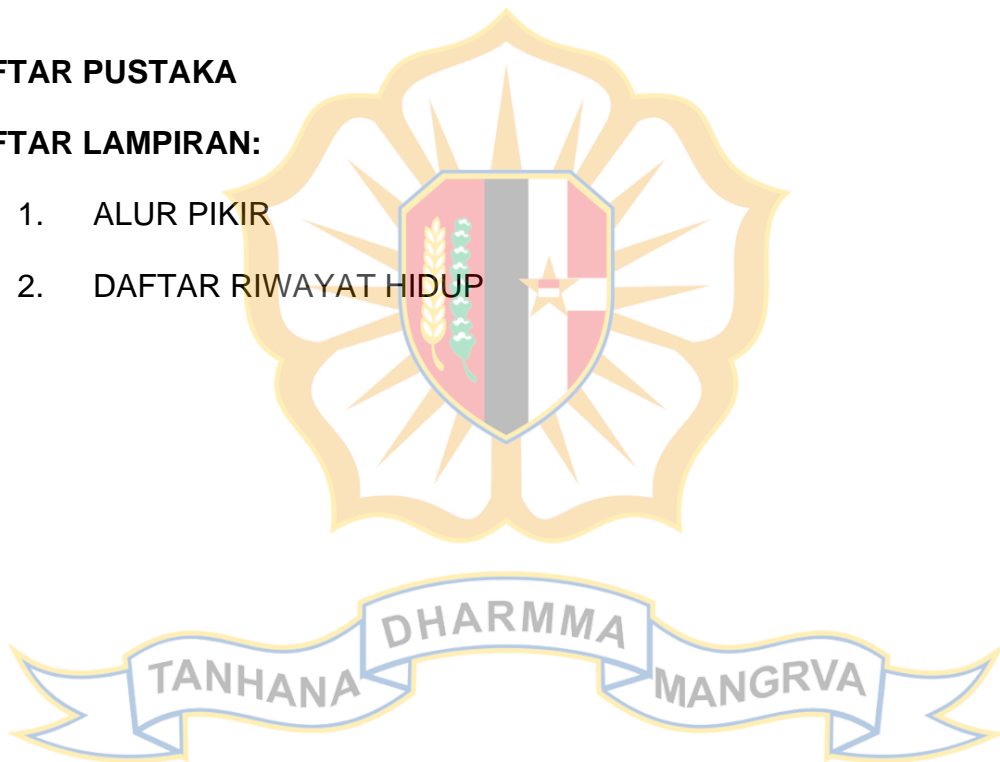
#### **BAB IV PENUTUP**

17. Simpulan .....	56
18. Rekomendasi .....	59

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan posisi yang strategis yang berada di persimpangan kegiatan lalu lintas ekonomi, politik, dan kebudayaan dunia. Hal ini membuat watak bangsa Indonesia semenjak dulu kala, sangat terbuka dan mudah menerima pengaruh asing yang berdatangan darimana saja, dengan tidak menghilangkan jatidiri budaya sendiri. Sebagai bangsa yang terbuka terhadap berbagai pengaruh, Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk baik dari sisi budaya, etnis, bahasa, dan agama. Dari sisi agama, di Indonesia hidup juga berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berbagai aliran kepercayaan juga berkembang dengan jumlah yang tidak kalah banyak dengan agama besar di dunia. Berbagai percampuran dari pengaruh asing dengan tradisi dan budaya asli itulah yang kemudian membentuk suatu kesadaran kebangsaan Indonesia saat ini yang membentuk wadah tunggal dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Ahli sejarah Dr. Baskara T. Wardaya menyatakan bahwa kebangsaan sejak awal sudah mendapat tantangan, misalnya pemberontakan daerah tahun 1956-1958, ada separatism di Maluku, dan DI/TII di Jawa. Pemberontakan itu bisa diatasi sebagai bangsa. Namun untuk jangka pendek ada pula ideologi trans-nasional yang sudah masuk ke Indonesia, radikalisme masuk di situ dengan memakai kendaraan agama. Jika ingin membangun kebangsaan harus diperjuangkan dari beberapa segi tersebut; 1) dari dalam negeri; 2) ada penyaringan dari luar negeri; 3) dan ada kegagalan-kegagalan masa lalu dari beberapa pihak yang harus diatasi; 4) juga kelompok-kelompok radikal yang harus ditindak tegas. Jika tidak akan terancam Negara kita sebagai bangsa, sama seperti Negara lain yang mempunyai masalah yang sama seperti Yugoslavia dan



Negara-negara Timur Tengah di mana konsep kebangsaannya masih kacau atau “gagal” mengelola rasa kebangsaan.<sup>1</sup>

Pengamat politik Indonesia Ben Anderson menyampaikan bahwa, sebagai sebuah bangsa dengan kemajemukannya yang ada, kebesaran jiwa bangsa Indonesia untuk menjadi satu bangsa sangat penting bagi keberlanjutan bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme atau semangat kebangsaan, adalah suatu kerja bersama yang harus selalu diperjuangkan. Bangsa Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di berbagai negara yang hancur sebagai akibat dari jiwa kerdil yang dimiliki oleh warganya. Di berbagai daerah, seperti Aceh, Ambon, Papua dan Riau, gejala disintegrasi mulai dirasakan semakin menguat. Konflik-konflik sosial muncul di dalam masyarakat, terutama konflik yang terjadi karena benturan antara penduduk asli pribumi dan penduduk pendatang.<sup>2</sup>

Secara internal, dekadensi dalam dimensi mental-kultural bisa menyebabkan ancaman bagi keberlangsungan negara bangsa, hal ini bisa terjadi karena rezim pendidikan gagal dalam membudayakan karakter dan moralitas bangsa, dengan implikasi peluluhan karakter kewargaan dan moralitas publik sebagai landasan kebersamaan tekad (*shared intentionality*) dan solidaritas sosial (*social embeddedness*). Selain itu, ancaman juga bisa disebabkan karena terjadinya dekadensi dalam dimensi institusional-politikal, sebagai akibat dari kegagalan rezim kebijakan (politik) dalam menetapkan rancang bangun maupun tata kelola demokrasi-pemerintahan, yang disebabkan karena terabaikannya tuntutan persatuan dan keadilan yang telah diamanatkan nilai-nilai luhur falsafah dan konstitusi negara. Dimensi kesejahteraan material juga bisa menyebabkan ancaman lainnya, hal ini disebabkan karena rezim produksi telah gagal dalam memberikan pemenuhan harapan terhadap inklusi ekonomi maupun persemakmuran bersama (*social welfare*), yang kemudian mengakibatkan kesenjangan sosial semakin lebar<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Brigida Intan Printina. 2019. *Merawat Memori Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia*. Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2019. Hal. 14.

<sup>2</sup> Anggraeni Kusumawardani & Faturochman. 2004, *Nasionalisme*. Buletin Psikologi. Tahun XII. No. 2, Desember 2004.

<sup>3</sup> Yudi Latif. *Menjaga Negara-Bangsa, Menjaga Moral Republik: Menimbang Ulang Negara-Bangsa*. Disampaikan sebagai Naskah Orasi pada Widjojo Nitisastro Memorial Lecture,

Salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang saat ini terus menjadi perhatian publik adalah semakin melemahnya rasa memiliki sebagai satu bangsa, berbagai fenomena yang ada saat ini menunjukkan rusaknya karakter bangsa kita seperti terkikisnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda, menurunnya rasa solidaritas dan kesetiakawanan maupun masih adanya fenomena intoleransi. Berbagai fenomena ini semakin menguat seiring dengan makin derasnya keterbukaan arus informasi global dengan perkembangan teknologi terutama di kalangan generasi muda. Sikap intoleransi semakin menebal yang ditandai dengan peningkatan saling curiga dan rasa benci di antara sesama anak bangsa, sikap individual yang makin melekat serta kecenderungan sikap menutup diri dari orang lain, selain itu hegemoni kelompok mayoritas terhadap minoritas pun semakin menebal.

Berbagai kasus kekerasan dan konflik identitas tampaknya tidak pernah hilang dalam realitas kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia. Beralihnya sistem pemerintahan otoriter menuju demokrasi ternyata tidak mampu memberikan harapan atas terwujudnya kehidupan berbangsa dan bermasyarakat layaknya kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah publik yang mendukung Pancasila. Pada sisi lainnya, masyarakat yang menghendaki Indonesia berlandaskan NKRI bersyariah (Pro-NKRI bersyariah) mengalami peningkatan jumlah. Hasil survei LSI ini juga menunjukkan, pada 2005 hingga 2018 ditemukan fakta bahwa terdapat penurunan terhadap pro Pancasila, dari 2005 sebanyak 85 persen menurun menjadi 75 persen di tahun 2018<sup>4</sup>.

Meningkatnya kasus intoleransi yang terjadi berbanding lurus dengan meningkatnya warga yang memiliki kecenderungan permisif terhadap ide, konsep dan tindakan yang berakar pada paham radikal yang kini makin subur di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh Wahid *Institute* memperlihatkan kecenderungan terhadap radikalisme dan intoleransi di Indonesia mengalami peningkatan trend dari waktu ke waktu. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Wahid Institute terdapat 0,4% atau  $\pm$  600.000 orang warga negara Indonesia

---

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. [https://www.aiipi.or.id/assets/images/widjojo/file\\_1546620258.pdf](https://www.aiipi.or.id/assets/images/widjojo/file_1546620258.pdf). diakses pada 20 Mei 2020 pukul 10.45 WIB

<sup>4</sup> Abdul Rivai Ras. 15 November 2018. *Politik Identitas dan Ancaman dalam Bernegara*. <https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/politik-identitas-dan-ancaman-dalam-bernegara-1542284278883209081>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.25 WIB

(WNI) yang pernah bertindak radikal. Jumlah ini didapatkan dari perhitungan yang berdasarkan jumlah penduduk dewasa Indonesia yakni sekitar 150 juta jiwa. Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, yaitu kelompok masyarakat yang bisa melakukan gerakan radikal bila diajak ataupun memiliki kesempatan, jumlahnya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%. Sedangkan, sikap intoleransi di Indonesia, menurut Wahid Institute cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%<sup>5</sup>.

Sikap intoleransi seringkali merupakan sebuah langkah awal menuju tindakan kekerasan. Pada tingkatan yang lebih luas, intoleransi akan menciptakan konflik komunal maupun sosial secara horizontal. Berbagai keragaman nilai dan keyakinan dianggap sebagai "musibah" karena bagi kelompok intoleran keragaman itu adalah fakta-fakta di luar dirinya yang harus ditolak. Kelompok ini menghendaki homogenisasi yang sejalan dengan nilai dan keyakinan yang dianut secara paksa. Jika kelompok seperti ini menjadi penguasa ataupun mengendalikan kekuasaan, maka mereka akan menggunakan segala cara untuk memastikan keseragaman sosial, nilai maupun keyakinan. Selain itu kelompok ini juga akan menentukan standar nilai yang harus dianut oleh kelompok lain menurut standar nilai yang telah ditentukan. Sikap dan cara pandang intoleransi ini bisa terjadi pada kelompok sosial maupun golongan manapun. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa kita, yaitu komitmen kebangsaan yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Presiden, bahwa masyarakat tidak boleh terprovokasi oleh paham-paham yang dikhawatirkan akan merusak sesuatu yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan komitmen kebangsaan, bangsa Indonesia harus mampu menghilangkan berbagai sifat fanatisme kelompok, ego kelompok, maupun sistem golongan. Apabila hal ini masih ada di dalam masyarakat, maka konflik akan mudah untuk terjadi, yang hanya akan menyebabkan perpecahan bangsa<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>. diakses pada 13 April 2020 pukul 11.50 WIB

<sup>6</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/24178/wapres-tantangan-sekarang-ekonomi-dan-komitmen-kebangsaan/0/berita>. diakses pada 13 April 2020 pukul 13.30 WIB.

Sikap intoleransi tidak hanya terjadi karena adanya perilaku intoleransi di masyarakat, tetapi juga bisa terjadi karena penerapan regulasi yang belum berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Sekelompok masyarakat menolak adanya rencana pembangunan pura di Desa Sukaurip Kabupaten Bekasi, alasannya sedikitnya jumlah umat Hindu di desa itu. Penolakan seperti ini memang bukan cerita baru. Pada tahun 2018 misalnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) melakukan penolakan terhadap renovasi Masjid Agung Al-Aqsha Sentani, Papua dengan alasan menara masjid yang dibangun melebihi tinggi gereja sekitarnya, di Jalan Raya Abepura. Penolakan pendirian rumah ibadah lainnya juga muncul di Kota Bogor Jawa Barat, jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin mengalami kesulitan membangun tempat peribadatannya. Pada tanggal 10 April 2012, Walikota Bogor saat itu, Dani Budiarto bahkan menyegel GKI Yasmin melalui pengerahan Satpol-PP. Dari beberapa kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang diterapkan terhadap pendirian rumah ibadah masih belum bisa berjalan dengan baik, salah satunya disebabkan karena adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 yang menyebabkan banyaknya umat beragama dari kalangan minoritas mengalami kesulitan mengakses peribadatan dengan nyaman dan aman. Padahal, kebebasan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dijamin dalam UUD 1945<sup>7</sup>.

Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri yang mengatakan bahwa, penting untuk disadari bahwa Indonesia merupakan bangsa dengan kondisi sosiologis beragam. Keberagaman itu menjadi fundamen pendirian negara Indonesia. Sulit untuk tidak dikatakan bahwa tidak akan ada Indonesia tanpa keberagaman. Penguatan toleransi menjadi elemen penting untuk menjaga dan merawat keberagaman. Gufron mengatakan bibit radikalisme ditimbulkan oleh banyak faktor, seperti agama, ekonomi, politik, sampai pendidikan. Tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dalam sistem pemerintahan. Apabila intoleransi terus-menerus tidak ditangkal dan

---

<sup>7</sup> Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah. <https://tirto.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJeE>, diakses pada 21 Mei 2020 pukul 13.25 WIB

dibiarkan, serta direspon dengan tegas, maka hal tersebut berpotensi menggerus sendi pendirian negara Indonesia<sup>8</sup>.

Sebagai acuan dalam komitmen kebangsaan, Pancasila mampu merangkul semua agama dan berbagai aliran kepercayaan di seluruh nusantara dalam suatu pigura Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara kita wajib untuk menghormati WNI lainnya, tanpa memandang agama, suku, maupun golongannya. Dengan menjunjung tinggi semangat dan jiwa kebhinnekaan akan menafikan nafsu yang mengedepankan perbedaan, fanatisme maupun kepentingan pribadi/kelompok. Selain itu jiwa kebhinnekaan mampu untuk menerima keunikan dan dimensi-dimensi yang khas dari setiap suku, agama, ras maupun golongan yang ada. Jiwa kebhinnekaan akan mengayomi keragaman itu dalam suatu wadah, yaitu bangsa Indonesia.

Komitmen kebangsaan perlu diperkuat untuk menangkal intoleransi. Memperkuat komitmen kebangsaan saat ini perlu diperkuat karena masyarakat terus berkembang, terlebih di era globalisasi yang tanpa batas atau *borderless* seperti sekarang. Jika komitmen kebangsaan sudah mendarah daging di seluruh masyarakat, sudah seharusnya masyarakat Indonesia tidak lagi mempermasalahkan perbedaan agama, ras, suku, golongan, kelompok, dan sebagainya. Komitmen kebangsaan bukanlah merupakan suatu wadah untuk menjadikan tempat meleburnya semua keberagaman dan satu khasanah, akan tetapi menumbuhkembangkan kembali semangat solidaritas, tenggang rasa, tepo seliro, rasa kekeluargaan dan rasa kegotongroyongan. Berbagai keragaman yang ada adalah suatu fakta yang harus dapat diterima dan dirangkai dalam suatu harmoni yang direkatkan oleh visi bersama untuk hidup berbangsa dan bernegara, serta dilandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa.

Berangkat dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut tentang bagaimana komitmen kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat harus mampu diberikan solusi alternatif bagi penguatannya sehingga pada akhirnya nanti akan mampu untuk mencegah berbagai intoleransi yang timbul di masyarakat.

---

<sup>8</sup> Imparsial: Intoleransi Muncul Karena Negara Sering Absen. <http://www.imparsial.org/publikasi/berita/imparsial-intoleransi-muncul-karena-negara-sering-absen/>. diakses pada 20 Mei 2020 pukul 19.25 WIB



## 2. Rumusan Masalah

Sikap intoleransi muncul sebagai akibat dari lunturnya komitmen kebangsaan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seharusnya apabila masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi dan tidak tergoyahkan sudah seharusnya tidak ada lagi sikap intoleransi yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah **“bagaimana memperkuat komitmen kebangsaan guna mencegah intoleransi di masyarakat?”**

Variabel utama yang dianalisis dalam penulisan ini yaitu komitmen kebangsaan dan intoleransi. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, terdapat empat pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam penulisan Taskap ini, yaitu:

- a. Bagaimana mengantisipasi pengaruh globalisasi?
- b. Bagaimana meningkatkan penegakan hukum?
- c. Bagaimana menghilangkan ketimpangan sosial?
- d. Bagaimana menghilangkan kepentingan politik tertentu?

## 3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang berbagai permasalahan dan pokok pikiran yang terkait memperkuat komitmen kebangsaan guna mencegah intoleransi di masyarakat dan memberikan beberapa alternatif konsepsi yang harus ditempuh. Selain itu dalam analisa nantinya akan melihat, hambatan maupun permasalahan apa saja yang dialami, dan upaya yang harus dilakukan.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberi kontribusi pemikiran, gagasan kebijakan, strategi dan berbagai upaya yang perlu dilakukan dalam memperkuat komitmen kebangsaan guna mencegah intoleransi di masyarakat.

## 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup dalam Taskap ini difokuskan pada pembahasan yang menjadi pertanyaan kajian dan upaya pemecahan

masalah yang terkait dengan komitmen kebangsaan guna mencegah intoleransi di masyarakat. Secara spesifik, lingkup penulisan dibatasi pada permasalahan komitmen kebangsaan dan intoleransi di masyarakat.

- b. Sistematika.** Adapun uraian pembahasan dan analisa terhadap pokok-pokok persoalan di dalam penulisan Taskap ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab Pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi para pembaca dalam memahami pembahasan.

### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab Kedua ini akan dijelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan referensi kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, data dan fakta maupun lingkungan strategis digunakan sebagai sumber rujukan dalam melakukan pembahasan dari latar belakang maupun rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Dalam bab ini juga di sampaikan mengenai kerangka teoritis yang digunakan sebagai referensi ilmiah untuk menjelaskan rumusan masalah yang ada.

### **3) BAB III PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang analisa terhadap data dan fakta-fakta yang ditemukan terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian yang didapatkan. Data dan fakta yang dianalisa merupakan rangkaian informasi yang di dapatkan ataupun telah di jelaskan pada Bab II. Dalam Bab ini akan diungkapkan mengenai analisis bagaimana memperkuat komitmen kebangsaan yang akan mampu mencegah intoleransi di masyarakat.

#### 4) BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

#### 5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Perorangan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Proses pencarian, pengumpulan dan penelitian data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai tulisan akademis berupa arsip, artikel ilmiah baik *online* maupun *offline* dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dalil-dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan secara komprehensif dan integral melalui pendekatan Ketahanan Nasional, yakni berbagai perspektif yang dapat dirujuk untuk memperkuat komitmen kebangsaan berdasarkan kondisi dinamis bangsa dan konsepsi Astagatra guna mencegah intoleransi di masyarakat.

#### 6. Pengertian

- a. **Komitmen**, merupakan salah satu aspek penting dari filosofi *human resource management*. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan mendahulukan atau menyelaraskan prioritas, kebutuhan dan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi<sup>9</sup>.
- b. **Komitmen Kebangsaan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen mempunyai arti perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak<sup>10</sup>. Sedangkan kebangsaan sering kali diartikan oleh para ahli sebagai nasionalisme, yang diartikan sebagai kesadaran dan

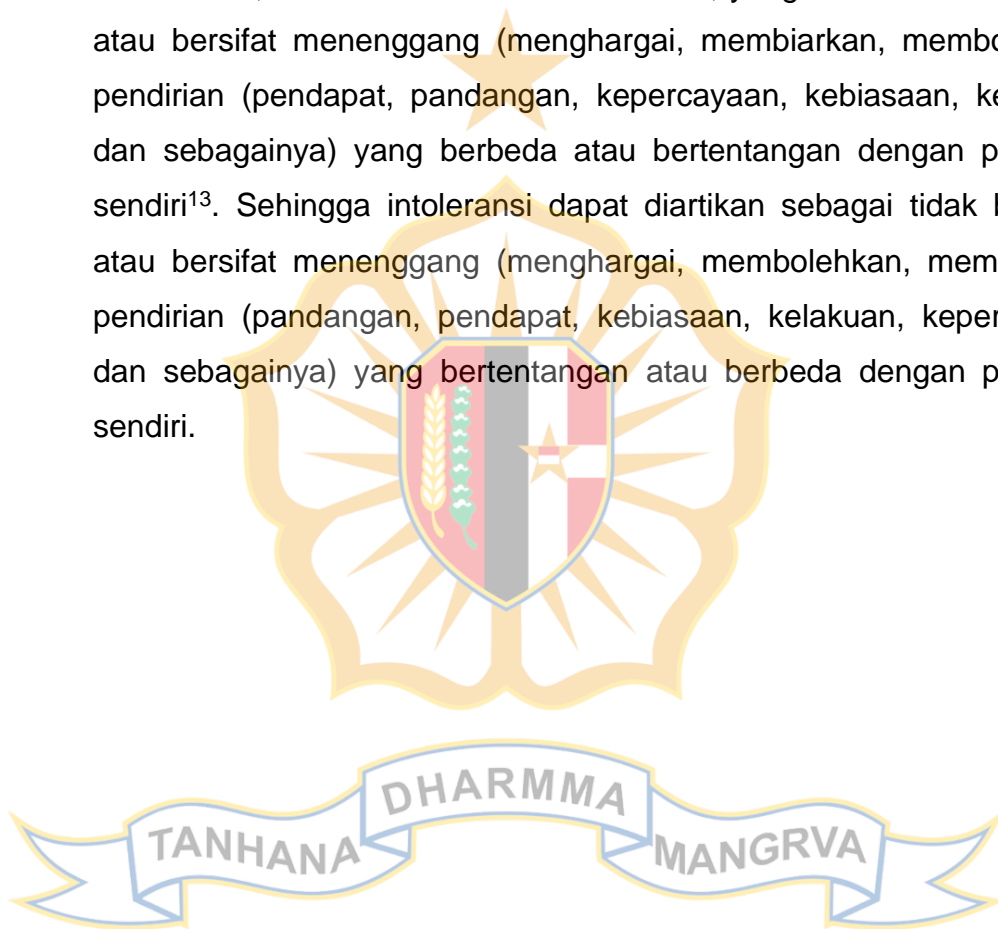
<sup>9</sup> Muhridin, Ansir, Sinarwaty. 2019. *Pengaruh Kemampuan Kerja, Komitmen Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal Manajemen, Bisnis dan Organisasi (JUMBO). JUMBO Vol. 3, No.1, April 2019, hal.221-234

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/komitmen>. diakses pada 25 Mei 2020 pukul 21.57 WIB



kebanggaan bernegara yang menimbulkan sikap dan perasaan yang lebih mementingkan kehidupan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah ataupun partai yang diwakili<sup>11</sup>. Sehingga komitmen kebangsaan pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan sebagai satu bangsa yang bersatu, berdaulat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>12</sup>.

- c. **Intoleransi**, adalah lawan kata dari toleran, yang memiliki arti bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri<sup>13</sup>. Sehingga intoleransi dapat diartikan sebagai tidak bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membolehkan, membiarkan) pendirian (pandangan, pendapat, kebiasaan, kelakuan, kepercayaan, dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.



<sup>11</sup> Anggraeni Kusumawardani & Faturachman. 2004, *Nasionalisme*. Buletin Psikologi. Tahun XII. No. 2, Desember 2004

<sup>12</sup> Hj. Nina Mirantie Wirasaputri. 2017. *Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 515-532

<sup>13</sup> <https://kbpi.web.id/toleran>. diakses pada 25 Mei 2020 pukul 19.30 WIB

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum**

Rasa kebangsaan rakyat Indonesia saat ini sering mengalami cobaan yang justru datang dari dalam, berbagai aksi yang menguji jiwa dan semangat kebangsaan menyeruak akhir-akhir ini. Berbagai demonstrasi dengan berlabel agama, kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok intoleran, kondisi pemenuhan hak kebebasan beragama dan keyakinan yang memburuk hingga ancaman terorisme. Berbagai kondisi tersebut menjadikan sebuah ancaman yang akan menuju kepada disintegrasi bangsa. Persoalan menurunnya komitmen kebangsaan ini harus dicari jalan keluarnya oleh seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai langkah yang dianggap perlu untuk memperkuat komitmen kebangsaan guna mencegah intoleransi di masyarakat. Atas dasar di atas, dalam pembahasan memperkuat komitmen kebangsaan ini, akan dianalisa dengan berbagai peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta serta berbagai pengaruh lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan strategis global, regional dan nasional di mana di dalamnya terdiri dari aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan yang akan menjadi pijakan awal bagi pembahasan pada bab berikutnya.

#### **8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

- a. **TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.**

Ketetapan ini secara umum berisikan tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan indentifikasi terhadap berbagai permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju rekonsiliasi nasional dan menentukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Komitmen dan kesadaran yang sungguh-sungguh dalam memantapkan persatuan dan kesatuan nasional diwujudkan melalui langkah-langkah nyata,

dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, dan merumuskan visi Indonesia dan etika berbangsa di masa depan.

**b. UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025**

Dalam visi RPJPN 2005-2025 telah dinyatakan bahwa suatu bangsa dikatakan sebagai bangsa yang makin maju apabila bangsa tersebut mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bahwa arah pembangunan sosial budaya dalam jangka panjang adalah melakukan pemantapan terhadap integrasi bangsa yang berbasis multikultur diarahkan agar keberagaman menjadi sumber kekuatan melalui berbagai upaya untuk mewujudkan sinergi diantara keberagaman tersebut. Agar kebhinekaan dapat tumbuh, berkembang, serta memperkuat keikaan dan persatuan bangsa, bentuk-bentuk sinergi tersebut harus menjadi ikatan fungsional yang kokoh. Sinergi tersebut harus juga senantiasa dapat mengantisipasi berbagai ancaman disintegrasi yang berbasiskan lokal kewilayahan dan SARA serta menguatnya ideologi internasionalisme yang cenderung mengaburkan dan memarginalkan keberadaan bangsa (*nation*). Untuk itu, pemantapan dan integrasi bangsa berbasiskan multikultur tersebut dilakukan melalui pengembangan beragam wujud ikatan kebangsaan baik yang bersifat emosional rasional maupun.

**c. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Tugas Pemerintah Daerah dalam rangka ketenteraman dan ketertiban masyarakat telah dirinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yakni pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) huruf b, dan Pasal 67 huruf a, serta Pasal 225 ayat (1) huruf c. Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi maupun tugas pembantuan yang diarahkan bagi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat, maupun peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan,

kekhususan dan keistimewaan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dengan demikian pada hakekatnya Undang-Undang ini bertujuan merealisasikan aktualisasi semangat kebangsaan, sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Kebijakan otonomi daerah maupun program-program pembangunan wilayah yang sedang berjalan, memberikan stimulasi bagi implementasi peningkatan nasionalisme. Kebijakan otonomi memberikan landasan politik kewenangan pembangunan di daerah oleh Pemerintah Daerah. Secara konseptual otonomi daerah merupakan landasan bagi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan di daerah.

**d. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 Desember 2016 silam telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres bertujuan membangun dan memperbaiki karakter bangsa mengacu pada nilai-nilai etos kerja, integritas dan gotong royong dalam membangun budaya bangsa yang bermartabat, maju, modern, sejahtera dan makmur berdasarkan Pancasila. Agar Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat mencapai tujuannya, hal ini kemudian di ikuti dengan Program Gerakan Indonesia Bersatu. Program ini dilakukan dengan fokus melalui 10 pendekatan, yaitu: 1) meningkatkan perilaku mendukung kehidupan demokrasi Pancasila; 2) meningkatkan perilaku kerukunan dan toleran inter dan antar umat beragama; 3) memberikan pendidikan/pembinaan yang mendukung peningkatan perilaku kesadaran nasionalisme, patriotisme maupun kesetiakawanan sosial; 4) meningkatkan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; 5) peningkatan perilaku memberikan perlindungan dan pengakuan bagi kelompok marjinal, minoritas dan berkebutuhan khusus; 6) peningkatan dukungan bagi peran dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan; 7) peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, lintas sektor dan komponen masyarakat; 8) meningkatkan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; 9) menyelenggarakan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti;

10) meningkatkan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.

**e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara**

Instruksi Presiden ini bertujuan memantapkan dan menyelaraskan usaha bela negara supaya lebih terstruktur, sistematis, masif dan terstandarisasi. Dalam Inpres ini ada tiga tahapan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Tahapan pertama adalah sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi. Tahapan kedua internalisasi nilai-nilai dasar bela negara, dan tahapan ketiga aksi gerakan. Presiden menginstruksikan seluruh pejabat untuk menjalankan ketiga tahapan tersebut. Pemantapan program bela negara dilakukan dalam beberapa pola. Pertama, pola kerjasama forum pendidikan wawasan kebangsaan. Kemudian, pola kerjasama yang dilakukan dengan lembaga pendidikan perguruan dan kedinasan. Selanjutnya, pola yang dilakukan adalah pola pengembangan teknologi informasi yang melibatkan pemuda.

**9. Kerangka Teoritis**

**a. Teori Bangsa.**

Istilah *natie* (*nation*) pertama kali populer sekitar tahun 1835. Bangsa (*nation*) atau nasional, kebangsaan atau nasionalitas, paham kebangsaan atau nasionalisme, dalam kajian sejarah, semua istilah tersebut terbukti memiliki konsep-konsep yang sulit untuk dirumuskan, sehingga para pakar di bidang Sosiologi, Politik, dan Antropologi pun seringkali tidak sepakat mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut. Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga mengenal istilah nasionalisme, istilah yang diturunkan dari kata asing “*nation*” yang bersinonim dengan kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang dapat dirancang mampu mendefinisikan istilah mengenai bangsa secara objektif, akan tetapi fenomena kebangsaan senantiasa aktual sampai saat ini<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Dwi Sulisworo, Tri; Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. 2012. *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Hibah Pembelajaran Non Konvensional*. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta. 2012

Menurut Benedict Anderson, bangsa merupakan komunitas politis dan dibayangkan sebagai suatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang sifatnya terbayang karena tiap-tiap anggota bangsa yang terkecil sekalipun tidak akan tahu maupun tidak akan mengenal sebagian besar anggota lainnya, mereka juga tidak akan bertatap muka, bahkan mungkin juga tidak pernah saling mendengar tentang mereka. Namun di pikiran setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka<sup>15</sup>. 'Bangsa' kemudian menjadi sesuatu yang secara sadar mampu diidamkan sejak awal, dan bukan merupakan bingkai visi yang perlahan-lahan menajam. Malah, sebagaimana akan kita lihat nanti, 'bangsa' terbukti merupakan temuan yang mustahil dimintakan hak patennya. 'Bangsa' tersedia untuk dibajak oleh siapa saja, termasuk oleh tangan-tangan yang sangat berlainan, terkadang tak terduga, dimana saja<sup>16</sup>. Disini bisa diartikan bahwa bangsa menurut Benedict Anderson lahir dari komitmen bersama untuk membentuk suatu komunitas dengan kesadaran sebagai suatu 'bangsa' yang hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Ernest Renan, unsur yang pembentuk negara bangsa adalah: (1) Jiwa atau asas kerohanian yang sama, berupa sistem nilai dan pandangan hidup; (2) Mempunyai solidaritas besar, misalnya persamaan nasib dalam sejarah; dan (3) Munculnya sebuah bangsa adalah buah dari sejarah. Di sini, menurut teori Ernest Renan, munculnya negara bangsa karena adanya pandangan hidup dan sistem nilai yang sama<sup>17</sup>.

Menurut Hans Kohn, nasionalisme merupakan sebuah paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan pada negara kebangsaan. Paham tersebut mulai muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk membangun suatu negara. Snyder berpendapat bahwa nasionalisme adalah satu emosi yang kuat dan telah mendominasi pikiran serta tindakan politik dari rakyat banyak sejak revolusi

<sup>15</sup> Benedict Anderson. 2001. *Komunitas-Komunitas Terbayang*. Edisi Kedua. Insist Press. Yogyakarta. 2001. (hlm 8)

<sup>16</sup> Ibid., (hlm 101)

<sup>17</sup> Andi Chandra Jaya. 2019. *Konsep Nation-State Dalam Pemikiran Ideologi Politik Melayu Islam Pada Abad Ke-19 M (Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854))*. Jurnal TAPIS Vol. 15 No.01 Januari – Juni 2019



Perancis. Hal itu tidak bersifat alamiah, tetapi merupakan suatu gejala sejarah, yang muncul sebagai reaksi terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial tertentu. Nasionalisme sebagai sebuah ideologi mampu memainkan 3 (tiga) fungsi, yaitu mengikat seluruh kelas warga bangsa, memperkokoh atau membangun pengaruh warga bangsa terhadap kebijakan yang diambil negara, dan menyatukan mentalitas warga bangsa. Nasionalisme merupakan salah satu alat perekat kohesi sosial untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara<sup>18</sup>. Demikian adanya dapat dikatakan bahwa, konsep nasionalisme di Indonesia bersifat Nasionalisme-Kebangsaan, nasionalisme-kebangsaan ini adalah hal penting yang seharusnya dimiliki setiap penduduk di Indonesia.

#### **b. Teori Kontrak Sosial.**

Sebelum terbentuknya negara, kehidupan manusia digambarkan sebagai suatu keadaan alamiah. Kehidupan manusia hanyalah suatu usaha terus menerus yang dilakukan untuk melakukan pemuasan hawa nafsu dan melakukan pencarian kebahagiaan maupun menghindari apa saja yang tidak disukainya. Keadaan alamiah tersebut kemudian menyeret manusia saling bersaing dan merebutkan kekuasaan. Manusia akan saling menyerang manusia lainnya. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi manusia saling bertarung, yaitu: (1) kecenderungan meraih kebesaran diri; (2) faktor agama; dan (3) faktor kesetaraan manusia. Oleh karena itu, manusia akan melakukan apa saja yang menurut mereka mampu menjamin keberlangsungan hidupnya masing-masing, tanpa memandang dan memperdulikan apakah hal tersebut menyakiti yang lain atau bertentangan dengan hukum ilahi<sup>19</sup>.

Jean Jacques Rousseau, seorang ilmuwan Perancis mengemukakan bahwa kontrak sosial dilakukan dengan; *pertama*, kontrak sosial hanya dilakukan oleh antara sesama rakyat maupun anggota-anggota masyarakat, *kedua*, melalui kontrak sosial itu masing-masing anggota masyarakat melimpahkan semua hak perorangannya pada komunitas sebagai suatu

<sup>18</sup> Evayatun Ni'mah. 2017. *Pandangan Nasionalisme Dalam Puisi Maḥmūd Darwisy Dan Rendra Dalam Analisis Sastra Banding*. Jurnal Humaniora Volume 2, Nomor 1, September 2017; ISSN: 2549-676X, E-ISSN: 2597-7822

<sup>19</sup> Daya Negri Wijaya. 2016. *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke*. Jurnal Sosial Pendidikan Humanis Volume 1, Nomor 2, Desember 2016

keutuhan. Dalam teori ini, Rousseau mengemukakan bahwa masing-masing individu akan melimpahkan semua hak perorangannya pada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan itu, semua hak alamiah yang dimiliki, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati seseorang dilimpahkan kepada komunitas, atau dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, juga dibatasi oleh tuntutan kehidupan bersama. Hal ini mengandung arti bahwa kebebasan yang dimiliki seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam teori ini dapat dipahami bahwa, anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial-keagamaan yang berbeda, merelakan diri untuk saling berinteraksi, namun mereka akan tetap loyal dengan agama mereka. Dalam konteks Negara Indonesia yang mempunyai beragam agama, *common value* untuk dijadikan kontrak sosial dan menjadi acuan bersama adalah Pancasila, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah memuat nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berdasarkan pemahaman ini, masa depan umat beragama akan menjadi “terang dan bersinar” karena tidak akan ada tindakan diskriminatif<sup>20</sup>.

### c. Teori Masyarakat Majemuk.

Furnivall melihat penguasa dan rakyatnya berasal dari 2 (dua) ras yang berbeda dan satu sama lain tinggalnya saling berjauhan. Dikarenakan dididik dalam ilmu ekonomi, analisa Furnivall lebih banyak terfokus pada aspek ekonomi dari jajahan Belanda. Baginya, masyarakat yang plural adalah masyarakat yang tidak ada konsensus. Masing-masing komunitas memiliki tatanan nilai yang tidak nyambung dengan komunitas yang lain. Untuk menjelaskan poin ini, dia membuat ilustrasi dengan membandingkan antara masyarakat plural dan homogen. Dalam masyarakat yang homogen, melakukan pembelian sebuah katedral, layaknya adalah melakukan pembelian ataupun pembiayaan sebagaimana halnya membeli kebutuhan sehari-hari yang memberi manfaat bagi semua warga negara. Akan tetapi, dalam masyarakat plural, melakukan pendirian Klenteng bisa menjadi “public

<sup>20</sup> Idrus Ruslan. 2013. *Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama*. Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013



*bad'*" (keburukan publik) bagi umat Islam; dalam hal yang sama, pendirian masjid hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberikan manfaat bagi orang Cina. Jadi, di masyarakat yang plural, tuntutan sosial kerap kali berujung pada pembiayaan masyarakat yang hanya bermanfaat bagi sekelompok masyarakat dan akan menjadi beban pembiayaan bagi kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, masyarakat plural cenderung gagal membangun tuntutan sosial umum. Namun, karena nilai bagi satu komunitas tidak dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengatur tingkah laku yang lain, ruang pertemuan dari tuntutan semua kelompok ada pada pasar<sup>21</sup>.

Keberadaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk sampai masa reformasi terlihat jelas dalam pluralisme budaya tetap terintegrasi dalam bingkai NKRI. Furnival pernah menyatakan bahwa masyarakat majemuk dengan pluralitas budayanya akan selalu menimbulkan konflik kepentingan antar kelompok. Bahkan Geertz menambahkan pengelompokan masyarakat Indonesia atas dasar primordial sangat sulit mengalami perubahan. Apa yang di tengarai Furnival dan Geertz bahwa kemajemukan dan pluralitas budaya Indonesia merupakan kendala krusial dalam merekatkan integrasi nasional<sup>22</sup>.

## 10. Data dan Fakta

### a. Globalisasi

Dari survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia pada tahun 2018 lalu, pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 171,17 juta jiwa dari 264,16 juta total populasi penduduk Indonesia atau 64,8% penduduk Indonesia adalah pengguna Internet. Dari para pengguna internet itu didapati bahwa 24,7% Alasan utama menggunakan internet adalah untuk berkomunikasi lewat pesan, dan 18,9% adalah untuk sosial media, sedangkan untuk alasan kedua menggunakan internet adalah untuk sosial media sebanyak 19,1% dan komunikasi lewat pesan sebanyak

<sup>21</sup> Mustaghfiroh Rahayu. 2017. *Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, 2017

<sup>22</sup> Middy Boty. 2017. Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang. JSA Vol 1 No 2 2017

16,4%<sup>23</sup>. Penggunaan internet berpengaruh besar bagi penyebaran informasi yang bisa memberikan pengaruh besar dalam penyebaran informasi dunia. Hal ini didukung dengan survei yang dilakukan oleh Setara Institute terhadap toleransi siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya, yang menemukan bahwa internet menempati posisi ketiga setelah guru sekolah dan orang tua yang menjadi sumber utama ketika mereka ingin mendapat pengetahuan agama. Dalam survei ini juga ditemukan bahwa 90,8% dari responden menggunakan internet untuk mengakses media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan lain-lain)<sup>24</sup>.

#### **b. Penegakan Hukum**

Prof. Mahfud MD. dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa salah satu problem kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum dan keadilan<sup>25</sup>. Masih banyak ditemui kejadian yang memperlihatkan lemahnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan kasus intoleransi, seperti kasus pembubaran kegiatan ibadah umat Hindu di Pajangan, Bantul, pada bulan februari 2019 yang lalu, Direktur Setara Institute, Halili mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja serius dalam menangani praktek intoleransi ini, tetapi faktanya kasus ini tidak ditangani secara serius. Penegakan hukum bagi pelaku intoleransi tidak diterapkan<sup>26</sup>. Presiden Joko Widodo bahkan telah memberi perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dan Kapolri Idham Azis untuk menindak tegas kepada pihak-pihak yang mengganggu terwujudnya kebebasan beribadah. Perintah itu dikeluarkan terkait kasus intoleransi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Dalam kasus ini, pembangunan gereja Katholik tersebut sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

<sup>23</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2018. Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia. 2018

<sup>24</sup> Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta & Bandung Raya Setara Institute, Jakarta 24 Mei 2016.

<sup>25</sup> Mahfud MD: Problem Kebangsaan Indonesia, Lemahnya Penegakan Hukum dan Keadilan, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/07/mahfud-md-problem-kebangsaan-indonesia-lemahnya-penegakan-hukum-dan-keadilan>. diakses pada 28 Juni 2020 pukul 10.45 WIB

<sup>26</sup> Pelaku intoleransi kebal hukum, bikin kasus pembubaran ibadah merajalela di jogja <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/13/510/1024645/pelaku-intoleransi-kebal-hukum-bikin-kasus-pembubaran-ibadah-merajalela-di-jogja>. diakses pada 25 Juni 2020 pukul 21.45 WIB

Karimun pada 2 Oktober 2019. Namun penerbitan IMB tersebut digugat oleh Aliansi Masyarakat Peduli Karimun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang. Ketua FUIB, Abdul Latif juga menyerukan penolakan terhadap pendirian gereja dengan alasan Karimun dihuni mayoritas muslim<sup>27</sup>. Sementara itu, data dari Imparsial menyebutkan bahwa terdapat 31 kasus intoleransi yang terjadi dalam kurun waktu sejak November 2018 sampai November 2019 di Indonesia. Beberapa kasus itu seperti pelarangan ceramah sampai pembubaran acara agama<sup>28</sup>.

### c. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh BPS, gini ratio Indonesia pada September 2019 diangka 0,380. Dimana dari angka ini masih ada 8 Provinsi dengan gini ratio di atas gini ratio Indonesia, Provinsi dengan gini ratio tertinggi adalah DIY di angka 0,428, sedangkan gini ratio terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan gini ratio di angka 0,262<sup>29</sup>. Angka kemiskinan di Indonesia per September 2019 berada di level 9,22 persen atau setara 24,97 juta orang. Akan tetapi dalam perkembangan terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, sebanyak 1,1 juta orang berpotensi menjadi miskin. Bahkan, jumlah tersebut dapat meningkat lebih banyak lagi jika kondisi semakin memburuk. Dalam skenario berat (angka kemiskinan) akan meningkat menjadi 1,1 juta orang atau dalam skenario yang lebih berat akan ada 3,78 juta orang yang berpotensi menjadi miskin sebagai akibat dari pandemi korona saat ini<sup>30</sup>. Tidak meratanya kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari ketimpangan yang terjadi. Berdasarkan data Credit Suisse, angka rata-rata kekayaan orang Indonesia per orang dewasa pada 2019 mencapai US\$10,545 per orang dewasa. Namun, angka median dari kekayaan per orang dewasa di Indonesia hanya US\$1.977 per orang

<sup>27</sup> Tindak Tegas Pelaku Intoleransi Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/289740-tindak-tegas-pelaku-intoleransi>. diakses pada 26 Juni 2020 pukul 22.05 WIB.

<sup>28</sup> Munculkan Efek Jera, Pelaku Intoleransi Harus Ditindak Tegas <https://www.vivanews.com/berita/nasional/39470-munculkan-efek-jera-pelaku-intoleransi-harus-itindak-tegas?medium=autonext>. diakses pada 26 Juni 2020 pukul 22.15 WIB.

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik. 15 Januari 2020

<sup>30</sup> Taufik Fajar. Angka Kemiskinan Bisa Bertambah 3,78 Juta Orang akibat Covid-19. <https://economy.okezone.com/read/2020/04/14/20/2198912/angka-kemiskinan-bisa-bertambah-3-78-juta-orang-akibat-covid-19>. diakses pada 10 Juni 2020 pk.21.20 WIB

dewasa. Credit Suisse mencatat terdapat 173 juta populasi orang dewasa di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 82 persen di antaranya hidup dengan kekayaan di bawah US\$10.000, jauh di atas rata-rata global dimana orang dewasa yang hidup dengan kekayaan di bawah US\$10.000 hanya 58 persen. Jumlah orang kaya di Indonesia dengan kekayaan di atas US\$100.000 hanya 1,1 persen, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 10,6 persen. Gini ratio kekayaan di Indonesia mencapai 83% dengan 1% kelompok paling kaya di Indonesia mempunyai akumulasi kekayaan mencapai 45%, kedua angka tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata internasional<sup>31</sup>.

#### **d. Kepentingan Politik Tertentu**

Beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seringkali berdampak terhadap nilai toleransi di masyarakat, produk hukum seperti Perda “Syariah” ataupun Perda “Injil” banyak di terbitkan oleh Pemerintah Daerah. Bahkan Pemerintah mendapati ada 421 Perda yang bersifat diskriminatif dan dapat memicu intoleransi<sup>32</sup>. Beberapa Perda yang bersifat diskriminatif dan dapat memicu intoleransi, antara lain: Hukuman cambuk bagi pelaku maksiat dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 hukuman jinayah; Perda tentang mengenakan busana muslimah tertuang dalam Surat Imbauan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05 Perihal: Mengimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah Kepada Kepala Dinas /Badan /Kantor /Biro /Instansi /Wali Kota Sumatera Barat; Surat Edaran Bupati Bone No. 44/1857/VIII tentang Larangan di Bulan Ramadan. Perda ini mengatur bagi restoran, rumah makan, warung, dan cafe tidak beroperasi selama Bulan Ramadan dan mengimbau kepada tempat penginapan dan hotel-hotel supaya tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim; Perda Injil di Manokwari mengatur mulai penggunaan simbol-simbol agama hingga minuman beralkohol dan

<sup>31</sup> Muhamad Wildan. Membedah Ketimpangan di Tengah Covid-19. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200405/9/1222787/membedah-ketimpangan-di-tengah-covid-19->. diakses pada 11 Juni 2020 pk.23.45 WIB

<sup>32</sup> Prosiding Konferensi Infid Kabupaten/Kota HAM 2017 Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan melalui Perluasan Kabupaten/Kota HAM. Jakarta, 6 - 8 Desember 2017

protitusi<sup>33</sup>. Bagaimanapun, perda syariah adalah produk politik yang dilahirkan oleh para politisi yang duduk baik di kursi legislatif maupun eksekutif. Partai politiklah yang seharusnya dikritik paling keras dalam mengeluarkan perda-perda bernuansa keagamaan. Hal ini disebabkan bahwa janji-janji kebijakan yang bernuansa syariah hanya merupakan modal bagi politik elektoral. Pernyataan ini bahkan tidak dibantah oleh politisi PBB di Cianjur, Muhammad Toha, maupun politisi Golkar, Muhammad Isnaeni, yang menganggap bahwa kampanye kebijakan syariah sah-sah saja dilakukan oleh peserta pemilu yang sedang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan<sup>34</sup>.

## 11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis

### a. Global

Perkembangan lingkungan global yang mempengaruhi kehidupan nasional bangsa Indonesia saat ini masih didominasi oleh arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat khususnya di bidang teknologi dan informasi. Keberadaan suatu negara tidak bisa terlepas dari pengaruh negara lainnya, sehingga mengakibatkan dunia seakan-akan tidak ada batasnya. Meski pada awalnya setiap inovasi yang diciptakan itu untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan umat manusia. Namun demikian, di sisi lain inovasi tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat negatif yang merugikan dinamika kehidupan. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah informasi, komunikasi, maupun transportasi membuat orang dapat berhubungan melewati batas negara seakan *border less* dalam waktu yang singkat, bahkan bersamaan. Saat ini globalisasi sangat ditentukan oleh perkembangan media sosial. Banyak peristiwa di satu belahan dunia bisa dengan cepatnya menyebar dan menjadi inspirasi bagi gerakan yang sama di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik karena pengaruh internet

<sup>33</sup> Inilah Daftar Perda Syariah yang Berlaku di Beberapa Provinsi di Indonesia. <https://www.islampos.com/inilah-daftar-perda-syariah-yang-berlaku-di-beberapa-provinsi-di-indonesia-115167/>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.23.45 WIB

<sup>34</sup> Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.05 WIB



terutama media sosial. Seperti gerakan yang disebut dengan Gerakan “Black Lives Matter” yang saat ini tengah menjadi pusat perhatian masyarakat global. Gerakan ini muncul kembali setelah adanya peristiwa kematian George Floyd pada 25 Mei 2020 lalu; seorang pria kulit hitam keturunan Afrika, yang tewas ketika dibekuk oleh polisi negara bagian Minnesota yang bernama Derek Chauvin. Kejadian ini telah menyulut kemarahan sebagian warga Amerika Serikat; tidak hanya warga kulit hitam, namun banyak juga warga kulit putih yang ikut bersimpati terhadap kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, tagar #BlackLivesMatter pun mulai ramai beredar di jagat maya, yang menarik simpati netizen di berbagai belahan dunia bahkan sempat menjadi trending topic di situs Twitter. Dengan masif, solidaritas terhadap warga kulit hitam menyebar melalui jejaring internet, dan di seluruh dunia kemudian mengampanyekan tagar #BlackLivesMatter<sup>35</sup>.

Hal ini memperlihatkan betapa cepatnya isu yang terjadi di suatu negara kemudian berubah menjadi sebuah isu global yang mempengaruhi negara lainnya. Indonesia juga tidak luput dari pengaruh isu gerakan “Black Lives Matter”, ketika pengguna media sosial Indonesia telah dibanjiri tagar #PapuanLivesMatter bersama #BlackLivesMatter, tidak lama setelah kejadian di Amerika Serikat tersebut. Bahkan sebuah situs web, “We Need to Talk about Papua”, telah disiapkan, sementara sebuah unggahan Instagram tentang situs tersebut menarik lebih dari 12.000 likes<sup>36</sup>. Apabila tingkat kepedulian dan kewaspadaan bangsa tidak sensitif dalam mengantisipasi arus globalisasi tersebut, dikhawatirkan akan menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal yang akan melemahkan rasa nasionalisme dari masyarakat. Sehingga hal itu menjadi pemicu bagi disintegrasi bangsa. Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital BSSN Bondan Widiawan pada suatu kesempatan menyampaikan bahwa, generasi muda dapat memilah berbagai informasi yang dijumpai di ruang siber dan menggunakannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya luhur

<sup>35</sup> Menilik Gerakan Tanpa Pemimpin #BlackLivesMatter di Amerika. <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/12/105519/menilik-gerakan-tanpa-pemimpin-blacklivesmatter-di-amerika>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.07 WIB

<sup>36</sup> Protes Black Lives Matter Gerakkan Aktivis Papua di Indonesia <https://www.matamatapolitik.com/protes-black-lives-matter-gerakkan-aktivis-papua-di-indonesia-new/>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.14 WIB

bangsa. Juga disampaikan bahwa, jaringan internet telah menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia yang mempunyai latar belakang tujuan dan nilai yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalangan generasi muda saat ini untuk mempergunakan internet dengan bertanggung jawab dan bijak agar tidak terbawa ke dalam pusaran arus budaya yang tak sesuai dengan kepribadian dan kepentingan bangsa Indonesia<sup>37</sup>.

#### **b. Regional**

Saat ini dunia semakin memberi perhatian kepada hubungan antar negara dalam batas kawasan atau regional, terutama kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sejak dua dekade terakhir, berkembang ikatan-ikatan kerjasama antar negara dalam batas regional tertentu (APEC, ASEAN, dsb) dan ikatan berdasarkan komoditi perdagangan (WTO, GATT, AFTA, dsb). Perkembangan kawasan regional terutama kawasan Asia Pasifik, cenderung tumbuh dengan cepat dan besar kemungkinan merupakan pusat kegiatan perekonomian yang akan menggeser kawasan Eropa dan Amerika.

Secara umum, isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan konflik komunal. Sementara itu, dalam skala terbatas, di beberapa negara masih terdapat konflik antarnegara yang berbasis pada klaim teritorial. Salah satu isu keamanan regional yang mengemuka adalah konflik antar negara terkait klaim teritorial. Isu yang menonjol antara lain, perkembangan Laut Cina Selatan, trilateral pengamanan Laut Sulu dari potensi ancaman ISIS, maupun perkembangan krisis Rohingnya. Ketegangan Laut Cina Selatan yang sudah cenderung mereda dan membaik perlu terus dipelihara. Indonesia juga mengapresiasi niat baik Tiongkok yang telah berkeinginan dan membuka diri bekerja sama memperkuat arsitektur keamanan kawasan.

Ancaman radikalisme dan terorisme pada saat ini membutuhkan perhatian yang lebih banyak. Radikalisme dan terorisme adalah ancaman yang bersifat lintas negara dengan jaringan maupun kegiatan yang tertutup

<sup>37</sup> Wakil Kepala BSSN Bedah Dampak Perkembangan TIK pada Nasionalisme dalam 'Kemendagri Goes to Campus'. <https://bssn.go.id/wakil-kepala-bssn-bedah-dampak-perkembangan-tik-pada-nasionalisme-dalam-kemendagri-goes-to-campus/>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.18 WIB

dan tersebar. Sehingga, penanganan terorisme dan radikalisme memerlukan tindakan bersama-sama dan penanganan secara kolektif melalui kolaborasi antara interaksi dan kapabilitas antar negara yang konstruktif, intensif dan konkrit. Untuk kawasan Asia Tenggara, ISIS telah menjadikan Filipina Selatan sebagai salah satu basis kekuatan, dimana hal ini ikut memicu munculnya aksi-aksi teror lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kelompok itu secara terus menerus merencanakan membangun Daulah Islamiyyah Katibah Nusantara, aliansi dari Divisi *Islamic State Asia Timur* di bawah kontrol struktur ISIS Pusat yang diketuai oleh Abu Bakr al-Baghdadi yang berbasis di Syria dan Irak. Selain itu, masalah lain yang menarik perhatian adalah krisis Rohingnya di Rakhine State, Myanmar. Sehingga saat ini diperlukan langkah-langkah konkrit dan penanganan secara bersama di kawasan Asia Tenggara yang tepat sasaran<sup>38</sup>.

### c. Nasional

#### 1) Geografi

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas keseluruhan (darat + perairan) adalah 8.300.000 km<sup>2</sup>; dengan panjang garis pantai Indonesia 108.000 km, memiliki jumlah pulau kurang lebih sebanyak 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau<sup>39</sup>, yang terdiri atas pulau besar berpenghuni dan pulau-pulau kecil yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, setiap pulau dikelilingi oleh laut. Laut merupakan penghubung antar pulau di NKRI, sehingga masalah komunikasi dan transportasi menjadi vital. Lalu lintas internasional banyak melintasi wilayah udara dan laut Indonesia yang memberi kemungkinan Indonesia untuk memainkan peranannya sebagai pengatur dan pengawas lalu lintas tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terletak pada posisi silang antara dua samudera dan dua benua, membawa

<sup>38</sup> Empat Isu Ini Ancam Keamanan Global?. <https://www.wartaekonomi.co.id/read168001/empat-isu-ini-ancam-keamanan-global.html>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.25 WIB

<sup>39</sup> Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.25 WIB



konsekuensi terhadap digunakannya Indonesia sebagai persinggahan bagi lalu lintas pelayaran maupun penerbangan dari berbagai negara. Kondisi ini membawa dampak terhadap terjalinnya hubungan antar bangsa yang bisa mempengaruhi perekonomian maupun sosial budaya dari masyarakat antar bangsa yang sempat berinteraksi. Manfaat yang bisa diambil adalah peningkatan devisa maupun pengkayaan budaya. Namun hal yang perlu diantisipasi adalah rawannya penyelundupan serta terpengaruhnya budaya nasional. Kondisi geografi yang sangat terbuka dan menempati posisi silang perhubungan antar samudera dan antar benua, membawa dampak terhadap mudahnya pengaruh dari luar yang akan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengaruh ideologi yang berkembang di tingkat global maupun regional.

## 2) Demografi

Jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan data terakhir tahun 2015 tercatat sebesar 238.518.000 jiwa<sup>40</sup>. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia di tahun 2019 diperkirakan mencapai sebanyak 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas sebanyak 134 juta jiwa laki-laki dan sebanyak 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini tengah menikmati momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak dari usia yang tidak produktif, yakni melebihi 68% dari total populasi<sup>41</sup>. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah lebih dari dua ratus tiga puluh juta jiwa yang tersebar di beribu-ribu pulau, terdiri dari beragam etnis dan budaya yang berkelompok dan mendiami pulau-pulau tertentu, misalnya orang Papua tinggal dan menjadi mayoritas di Propinsi Papua, orang Aceh tinggal dan menjadi mayoritas di Propinsi Aceh, demikian pula penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terpencil. Kalau kita cermati kondisi yang demikian, akan memudahkan kelompok-kelompok

<sup>40</sup> Jumlah Penduduk Indonesia 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.28 WIB

<sup>41</sup> Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.36 WIB

tersebut membentuk suatu etnisitas yang kuat. Etnisitas yang kuat apabila dibarengi dengan rasa kebangsaan yang tinggi, dapat membuat rasa persatuan dan kesatuan yang lebih solid. Namun sebaliknya, apabila tidak diimbangi dengan rasa kebangsaan yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.

### 3) Sumber Kekayaan Alam

Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat dijadikan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber kekayaan alam flora, fauna, mineral, tanah, udara, ruang angkasa, energi alami, air dan lautan, sebagai karunia Tuhan adalah memberi kehidupan kepada umatnya dan menjadi modal dasar dalam hidupnya. Memang disadari, keunggulan komparatif tersebut harus diikuti dengan peningkatan keunggulan kompetitif dari *'value added'* produk. Mengingat lokasi dan konsentrasi SKA tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, maka SKA perlu dikelola dengan baik untuk dinikmati seluruh anak bangsa. Sesuai dinamika pembangunan nasional, maka secara otomatis akan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap SKA. Oleh karena itu, melalui pasal 33 UUD NRI 1945 negara telah memberikan rambu-rambu bahwa SKA harus dikuasai oleh negara. Sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah, sumber kekayaan alam ini diatur oleh pemerintah pusat, hasilnya didistribusikan ke seluruh propinsi di Indonesia, sehingga daerah yang tidak mempunyai sumber kekayaan alam turut menikmatinya. Namun setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, dan daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber kekayaan alam yang dimilikinya mengakibatkan daerah yang tidak memiliki sumber kekayaan alam menerima pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Kondisi ini akan menimbulkan rasa kedaerahan yang kuat, namun disisi lain akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Mencermati hal tersebut di atas, Negara harus mampu membuat aturan tentang sistem pengelolaan dan pengawasannya secara akuntabel dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan budaya

setempat. Sebab selama ini pengelolaan dan pemanfaatan SKA sering memicu terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang menghambat produktivitas masyarakat, karena hak-hak masyarakat lokal (kearifan lokal) diabaikan pemerintah dengan dibungkus jargon demi kepentingan nasional yang semu.

#### **4) Ideologi**

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa. Untuk mencapai ketahanan ideologi, perlu penghayatan dan pengamalan Pancasila secara objektif maupun subjektif. Pelaksanaan secara objektif adalah pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi yang tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD NRI 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sedangkan pelaksanaan secara subjektif adalah nilai-nilai dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, masyarakat, dan warga Negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa, dalam periode pasca reformasi, belum dirasakan keberadaannya oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih menunggu penerapan Pancasila secara konsisten yang membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Selama masa Orde Baru, Pancasila merupakan salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan, oleh sebab itu, saat ini pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila relatif kurang memenuhi harapan. Di saat krisis sekarang ini, seyogyanya semua pihak semakin memegang teguh nilai-nilai Pancasila, tetapi dari gejala yang terdeteksi justru menunjukan adanya penurunan. Sampai kini bangsa Indonesia masih tetap utuh dan bersatu, adalah suatu bukti bahwa nilai-nilai Pancasila telah merasuk dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.

#### **5) Politik**

Dalam sistem politik dan pemerintahan sekarang ini, dominasi partai politik sangat kuat. Hal ini dirasakan sejak reformasi bergulir, maka era perpolitikan memberikan warna dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di satu sisi memang sangat bermanfaat dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Sebab sekat-sekat komunikasi dan kontrol masyarakat menjadi sangat kuat. Sekarang partisipasi masyarakat dalam politik dapat tumbuh dan disalurkan melalui kelembagaan penyalur pendapat masyarakat, mulai dari desa sampai ke pusat, melalui media massa, jejaring sosial maupun melalui lembaga pemerintah atau lainnya. Di samping sisi positif tersebut, dominasi partai menimbulkan eksese negatif karena cenderung bersifat transaksional. Hal ini merembet kepada kualitas hasil pekerjaan yang sarat kepentingan. Yang paling memprihatinkan adalah produk-produk legislatif berupa regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat yang sangat berpotensi melahirkan konflik horizontal yang dapat mengarah terjadinya disintegrasi.

Penggunaan politik identitas yang berlabelkan agama juga seringkali menjadi penyebab persoalan toleransi dan kemajemukan menjadi terganggu. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, pada tahun 2016 yang lalu adalah salah satunya yang menyita perhatian publik. Saat itu, banyak umat Islam di Indonesia merasa marah terkait ucapan Ahok yang dinilai telah menistakan Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 51. Berawal dari sinilah, intensitas ketegangan antar kedua kelompok semakin meningkat dan memunculkan praktek politik identitas di Indonesia. Praktek politik identitas tersebut terus berlanjut dan mewarnai atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>42</sup>. Politik identitas yang berlebihan memiliki bahaya, yaitu bisa berujung pada fasisme, atau bahkan menjadi lebih buruk lagi yaitu munculnya separatisme dan masyarakat yang sudah terasimilasi berdasarkan identitas tertentu akan dapat dengan mudah untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mencapai agenda politiknya. Masyarakat Indonesia seolah-olah dibuat kehilangan identitas, jatidiri dan ingatan akan sejarah keragaman yang dimiliki.

## **6) Ekonomi**

Saat ini perekonomian dunia terutama Indonesia sedang mengalami pukulan yang sangat berat sebagai akibat dari pandemic

<sup>42</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4744879/plural-society-dan-konflik-identitas>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.45 WIB

covid19 yang sampai sekarang belum memperlihatkan tanda-tanda akan selesai. Penyebaran virus ini tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan masyarakat di satu bangsa atau di satu Negara saja. Akan tetapi permasalahan yang lebih kompleks dari itu adalah adanya bayang-bayang resesi ekonomi maupun ketidakpastian situasi ekonomi global. Saat ini Indonesia sudah mengalami dampak dari ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh merebaknya Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020 silam, nilai tukar USD 1 terhadap rupiah mencapai sebesar Rp. 14,265.00, per tanggal 9 April 2020, nilai tukar USD 1 terhadap rupiah sebesar Rp. 15,880.00. Jadi rupiah melemah sebesar 1,615 poin atau melemah sebesar 11.32% dalam 39 hari. Pelemahan terburuk rupiah hingga 10 April 2020, terjadi pada tanggal 23 Maret 2020, dengan nilai tukar USD 1 terhadap rupiah sebesar Rp. 16,575.00 atau melemah sebesar 16.19%. Dampak Ekonomi lainnya adalah pergerakan IHSG yang terjun bebas. Data IHSG memperlihatkan bahwa sebelum terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, IHSG berada pada kisaran 6000-an, namun setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia, IHSG terjun bebas mencapai kisaran 4000-an<sup>43</sup>.

Upaya pemulihan ekonomi belum menunjukkan hasil yang signifikan, dan belum mampu meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari keterpurukan. Kepercayaan pelaku ekonomi dari dalam dan luar negeri kepada pemerintah masih perlu terus ditingkatkan. Pemberdayaan ekonomi rakyat masih membutuhkan waktu dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Demikian pula, pelaksanaan deregulasi perizinan sampai sekarang belum efektif, sehingga masih banyak terjadi ekonomi biaya tinggi. Hal ini, berdampak lemahnya daya saing produk nasional di pasar regional maupun internasional.

## 7) Sosial Budaya

Dampak dari globalisasi telah mengakibatkan perilaku kehidupan masyarakat menjadi individualistis dan liberal yang menjauh dari nilai-

<sup>43</sup> Estro Dariatno Sihalo. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/340554267>. diakses pada 14 Juni 2020 pk.21.20 WIB



nilai budaya bangsa yang menganut Pancasila. Globalisasi ini juga membenturkan kultur asli bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dengan budaya asing. Komunikasi dan integrasi sosial oleh suku-suku bangsa yang tinggal di Nusantara ini, di tahun 1928 sudah mampu membulatkan aspirasi untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Puncaknya, adalah pengakuan oleh bangsa-bangsa di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa keanekaragaman budaya justru merupakan hikmah bagi bangsa Indonesia yang di masa lalu mampu memunculkan faktor perekat persatuan dan integrasi bangsa.

Indonesia merupakan negara multikultur yang didiami oleh beragam latar belakang sosial budaya yang sangat beragam. Memberikan kesempatan berkembang sesuai jatidiri masing-masing komunitas suku, bahasa, agama dan budaya akan memperkaya khasanah kehidupan. Upaya untuk melestarikan keberadaan faktor perekat persatuan bangsa, yaitu keinginan dan semangat untuk hidup dan meraih cita-cita bersama harus diwujudkan dalam suatu dialog yang egaliter dan toleransi seluruh bangsa sesuai nilai-nilai multikultural. Informasi yang diterima secara leluasa melalui media cetak maupun elektronika, telah mengakibatkan masuknya nilai dan budaya asing yang terkadang kurang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang ada. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya benturan-benturan budaya dan penyempitan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara. Akibatnya rakyat Indonesia dapat memantau dengan cepat perkembangan yang terjadi di belahan dunia lainnya.

## **8) Pertahanan dan Keamanan**

Kondisi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia yang cukup baik dapat menjadi modal utama guna mendorong upaya pemantapan tannas, namun demikian beberapa aspek di atas dapat sewaktu-waktu menurunkan tingkat stabilitas. Masih adanya potensi

konflik sosial eksekusi pemilu/pemilukada, perebutan pengelolaan SKA dan lahan ekonomi lain serta rentannya konflik berlatar belakang SARA yang belum diselesaikan tuntas yang menimbulkan ketidakstabilan situasi hankam nasional.

Saat ini penyebaran hoax dan ujaran kebencian sangat mendominasi kehidupan masyarakat. Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan agar para penyedia platform ini harus menangani serius dan bertanggung jawab atas maraknya konten negatif. Salah satu langkahnya adalah aktif memberikan langkah responsif dan konkret dalam mengeliminasi dan menangani penyebaran ujaran kebencian atau hate speech dan hoax. Penyebaran hoax telah berlangsung sangat masif dan mulai mengganggu keamanan nasional. Platform media sosial harus mampu menaati segala peraturan dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai luhur di Indonesia<sup>44</sup>.

Saat ini kita juga tengah menghadapi ancaman Virus Corona Covid-19, yang secara langsung ataupun tidak juga mengancam pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu kondisi peralatan pertahanan yang “usang” dan minimnya ketersediaan anggaran merupakan beban pemerintah yang cukup berat dihadapkan pada tuntutan penegakkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua harus bergotong-royong membentuk kondisi dan situasi yang mengarah kepada pola standar pertahanan dan keamanan negara yang mengacu pada *total defence* dan teknologi, serta Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

<sup>44</sup> Hoax Ancam Keamanan Nasional, Platform Medsos Harus Tanggung Jawab. <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1130507-hoax-ancam-keamanan-nasional-platform-medsos-harus-tanggung-jawab>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.10 WIB

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN**

### **12. Umum**

Komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh seluruh komponen bangsa, hendaknya senantiasa dipupuk dengan bekerja keras, ulet, jujur serta penuh pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga simpul-simpul persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjalin erat. Berbagai unsur perekat bangsa seperti rasa cinta tanah air, toleransi, gotong-royong dan lain sebagainya hendaknya tetap dipertahankan. Sebagai bangsa yang besar dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk menjadi bangsa yang besar dan maju. Seluruh komponen bangsa hendaknya tidak melupakan komitmen kebangsaan yang telah ada. Cita-cita untuk menjadi bangsa yang besar dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat akan terwujud jika segenap lapisan masyarakat memiliki tekad dan kesadaran bersama, saling menyatukan komitmen, tidak mudah terpecah-belah dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Atas dasar di atas, dalam bab ini akan disampaikan pembahasan mengenai upaya memperkuat komitmen kebangsaan yang akan dilakukan dengan menganalisa berbagai data dan fakta yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya. Selain itu di dalam bab ini juga akan disampaikan berbagai hambatan maupun kendala yang dihadapi beserta dengan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk memperkuat komitmen kebangsaan.

### **13. Mengantisipasi Pengaruh Globalisasi**

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi awal perkembangan proses globalisasi. Perkembangan di bidang ini kemudian menjadi penggerak bagi berkembangnya globalisasi yang kemudian mempengaruhi perkembangan di sektor lainnya dalam kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat terlihat dengan berkembangnya teknologi parabola, TV dan internet, di mana orang yang berada di belahan bumi manapun akan mampu mengakses berita yang berasal dari belahan dunia lain secara cepat. Hal ini membuat interaksi yang terjadi antar masyarakat dunia menjadi semakin



cepat dan luas, sehingga pada akhirnya masyarakat dunia akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Kata globalisasi sendiri diambil dari global yang maknanya universal. Hingga saat ini globalisasi belum memiliki definisi maupun pengertian yang pasti, sehingga makna globalisasi sangat tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan tentang globalisasi. Malcom Waters, seorang professor sosiologi dari Universitas Tasmania, berpendapat bahwa globalisasi merupakan suatu proses sosial yang berdampak pada pembatasan geografis dalam keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang menjelma dalam kesadaran orang. Sedangkan Emanuel Richter, guru besar pada ilmu politik Universitas Aachen Jerman berpendapat bahwa, globalisasi merupakan jaringan kerja global secara bersamaan yang mampu menyatukan masyarakat dari sebelumnya yang terpencar-pencar dan terisolasi menuju ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Pendapat lain dikemukakan oleh Selo Soemardjan, yang menyatakan bahwa globalisasi adalah terbentuknya komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia dalam mengikuti kaidah dan sistem yang sama<sup>89</sup>.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs. Suhardi Alius., M.H mengatakan bahwa kondisi zaman yang terus berubah tentunya tidak bisa dihindari, arus globalisasi yang terus mendera dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah menggerus rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat. Anak muda saat ini menjadi individualis, mereka semakin cuek dengan lingkungannya, jika tidak ada hubungan dengan mereka, mereka tidak akan mau tahu, hal ini menyebabkan nilai kebangsaan, nasionalisme maupun persaudaraannya secara tidak langsung makin tergerus. Suhardi Alius juga mengungkapkan, bahwa di zaman sekarang orang tidak lagi belajar ilmu agama di IAIN, sekarang orang belajar tentang agama kepada 'ustad google', sehingga banyak yang terjebak pada ajaran yang menyesatkan<sup>90</sup>.

<sup>89</sup> Nurhaidah, M. Insya Musa. *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar. Vol. 3 No. 3, April 2015, hal 1- 14. ISSN: 2337-9227

<sup>90</sup> Arus Globalisasi dan Berkembangnya Teknologi Menggerus Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan kata Suhardi. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/09/arus-globalisasi-dan-berkembangnya-teknologi-menggerus-rasa-nasionalisme-dan-kebangsaan-kata-suhardi>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB

Derasnya arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi sudah menghinggapi generasi muda di Indonesia. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh SETARA Institute (2015) terhadap siswa-siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri di Jakarta dan Bandung (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dan Bandung Raya), bahwa 41% responden menghabiskan waktu untuk mengakses internet lebih dari 5 jam setiap harinya. Ketika mengakses internet, pilihan topik yang dikunjungi terbanyak adalah mengakses hiburan/entertainment (34.2%) dan (90.8%) mengakses internet untuk menggunakan media sosial<sup>91</sup>. Survei lainnya yang dilakukan oleh SETARA Institute terhadap Siswa SMU Negeri di Jakarta dan Bandung, menemukan hasil yang mengejutkan bahwa 8,5% responden menyatakan setuju jika Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan agama tertentu. Dengan kata lain, ada 1 dari 12 siswa yang setuju Pancasila diganti sebagai dasar negara. Selain itu dari 75,3% yang menyatakan mengetahui tentang ISIS, 9,5% menyatakan setuju dengan gerakan ISIS. Dengan total responden sebanyak 684 responden, angka 49 ini berarti sekitar 7,2%. Dengan kata lain, setidaknya terdapat 1 dari 14 siswa yang menyetujui gerakan ISIS. Hal ini tentu tidak mengherankan, selain pemberitaan yang cukup gencar, para responden juga aktif dalam mengakses media informasi, terutama internet. Selain itu, keberadaan media televisi juga turut menyuplai pengetahuan siswa, salah satunya tentang gerakan ISIS ini<sup>92</sup>.

Penelitian lainnya yang menunjukkan betapa globalisasi dengan arus informasi yang sangat mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan adalah penelitian yang dilakukan oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) bekerja sama jaringan GUSDURian. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ada 20 akun Twitter paling sering mencuit dan *retweet* (mengicau-balik) pesan-pesan ekstremis atau radikal, dengan dua kata yang paling banyak menjadi konten kicauan, yaitu “kafir” dengan 5.173 kicauan, dan selanjutnya “komunis” sebanyak 995 kicauan dalam sebulan. Sementara itu dalam platform Facebook, riset itu menjumpai 884 unggahan yang memuat kata kunci yang tergolong radikal dan ekstremis. Dari 884 itu, sebanyak 171 unggahan yang

<sup>91</sup> Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya SETARA Institute, Jakarta 24 Mei 2016

<sup>92</sup> Setara Institute. Laporan Survei Tentang Persepsi Siswa SMU Negeri Di Jakarta & Bandung Terhadap Toleransi. Setara Institute, 30 Maret 2015

memuat kata kunci ekstremis sesuai indikator *The International Centre for Counter-Terrorism* (ICCT). Hal ini ditanggapi oleh PB NU yang menilai pemerintah gagap dalam membangun kontra-narasi sehingga radikalisme tumbuh subur di dunia maya. Sikap toleransi dan moderat setiap hari digempur oleh berbagai konten dan tayangan radikal yang dengan begitu mudahnya viral dan disebar di media sosial<sup>93</sup>.

Penjelasan maupun data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya banyak yang menggunakan media massa terutama media internet di kehidupan sehari-harinya. Hal inilah yang banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggunakan media internet sebagai alat penyebaran propaganda radikalisme terutama melalui media sosial. Kelompok radikal menggunakan dan memanfaatkan media internet dan media sosial untuk menyebarkan paham-paham radikalisme. Kelompok-kelompok radikal memanfaatkan beraneka situs seperti Blogger, Twitter, YouTube dan Facebook dengan tujuan-tujuan seperti pemikiran, dorongan, penyebaran, bahkan perekrutan anggota kelompok. Sebagai kelompok yang banyak menggunakan internet, generasi muda akan mudah terpengaruh dengan informasi yang belum pasti kebenarannya, sering kali mereka terpengaruh dan menjadikan informasi di internet sebagai legitimasi untuk tindakan radikal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa generasi penerus bangsa terancam akan terkontaminasi oleh paham-paham radikal yang menimbulkan perpecahan bagi bangsa Indonesia<sup>94</sup>.

Persoalan persatuan bangsa pada akhir-akhir ini sering kali disebabkan karena pesatnya perkembangan media sosial. Banyak kalangan yang menyalahgunakan media sosial untuk menebar hujatan, kebencian, informasi hoax, hasutan, serta paham radikal. Hal ini sangat disayangkan, karena media sosial yang seharusnya menjadi simbol kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi justru disalahgunakan sehingga menjadi senjata makan tuan bagi persatuan negeri. Saat ini kita dengan mudah dapat menjumpai akun maupun laman di media sosial yang isinya menyebar kebencian yang

<sup>93</sup> Survei: Pesan Intoleransi Bertebaran di Media Sosial. <https://tirto.id/survei-pesan-intoleransi-bertebaran-di-media-sosial-cfeY>. diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 20.35 WIB

<sup>94</sup> Isky Fatimah. Pengaruh Media Sosial dalam Penyebaran Konten Propaganda Radikal. <https://www.kompasiana.com/iskyfatimah7229/5d96dd720d823027842f4942/pengaruh-media-sosial-dalam-penyebaran-konten-propaganda-radikal?page=all>. diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB

mengatasnamakan agama, golongan, kelompok, maupun perorangan. Kita bahkan tidak dapat menutup mata bahwa saat ini internet telah dijadikan alat untuk menyebarluaskan hasutan, kebencian dan radikalisme, khususnya di media sosial. Bukan hanya netizen yang tidak bijaksana dalam menggunakan medsos, namun dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat besar, pemerintah saat ini belum menjadikan badan siber nasional sebagai instrumen untuk menangkal berbagai pengaruh buruk yang menyusup melalui internet.

Seperti halnya dengan ketegangan yang terjadi di Papua. Pada awalnya kejadian ini dipicu oleh ujaran yang bernada pelecehan (rasis) serta adanya perlakuan represif oleh aparat keamanan terhadap beberapa mahasiswa Papua di Surabaya. Ujaran yang bernada rasis ini kemudian ditanggapi dengan aksi protes yang disertai dengan perusakan sejumlah fasilitas publik. Tidak lama berselang di Wamena terjadi kekacauan yang dipicu hoax di media sosial yang beredar di masyarakat pada minggu sebelumnya<sup>95</sup>.

Tidak kita pungkiri bahwa saat ini media sosial telah memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan tatanan masyarakat, tak terkecuali dalam pola keberagaman. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cahyo Pamungkas menyebut media sosial berperan penting dalam mendorong seseorang bersikap intoleran. Dari penelitiannya terungkap bahwa, media sosial banyak digunakan oleh orang yang memiliki tingkat fanatisme tinggi, dukungan terhadap sekularisasi yang rendah, spiritualitas keagamaan yang rendah, perasaan terancam dan ketidakpercayaan pada kelompok lain yang tinggi akan mendorong orang dengan identitas agama dan etnis yang kuat bertindak intoleran dan radikal. Fenomena intoleransi saat ini sudah berada pada tingkatan yang mengkhawatirkan, teknologi menyediakan informasi serta gagasan transnasional yang tidak dapat dibendung, saat ini hanya melalui media sosial semua orang bisa mengakses informasi<sup>96</sup>. Senada dengan itu, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono menganggap keberadaan internet sebagai salah satu sarana

<sup>95</sup> Luthfia Ayu Azanella. *Kronologi Ricuh Wamena, Penyebab, Dampak, Hingga Tanggapan Presiden*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/061500065/kronologi-ricuh-wamena-penyebab-dampak-hingga-tanggapan-presiden?page=1>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.35 WIB

<sup>96</sup> Peneliti LIPI Ungkap Korelasi Media Sosial dan Intoleransi. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/12/05/pj8toz320-peneliti-lipi-ungkap-korelasi-media-sosial-dan-intoleransi>. diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 18.35 WIB

bagi berkembangnya radikalisme di Tanah Air. Seperti yang menimpa 2 (dua) orang polwan di Polda Maluku Utara yang belajar paham radikal lewat media sosial yang terenkripsi. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita tidak bijak menggunakan teknologi, maka akan gampang membuat kita menjadi salah jalan ataupun menimbulkan permasalahan<sup>97</sup>.

Hasil penelitian Leni Winarni menunjukkan bahwa media internet mengambil porsi dan peranan yang sangat besar menginformasi kepada publik, terutama kaum muda akan ideologi radikal. Hal ini didukung dengan fakta bahwa organisasi-organisasi radikal banyak melakukan perekrutan kaum muda dengan menggunakan media internet. Organisasi-organisasi itu memanfaatkan teknologi untuk memudahkan mereka menyebarkan propaganda dan merekrut anggota potensialnya melalui internet, hal ini adalah hal yang sangat miris dari kemajuan media massa. Apabila media masa tidak dikontrol dengan baik, maka akan membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat ini diyakini oleh Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa ancaman terbesar bukan dari terorisme dan radikalisme Islam karena berdasarkan jumlah pengikut radikalisme Islam di Indonesia sangat kecil apabila dibandingkan dengan mayoritas umat Islam Indonesia yang cinta damai, tetapi datang dari media masa dan teknologi informasi global, yang semakin lama semakin tidak terkontrol oleh pemerintah<sup>98</sup>.

Semakin derasnya pengaruh nilai-nilai budaya global membuat keberadaan Pancasila sebagai ideologi, falsafah hidup bangsa dan dasar negara semakin terkaburkan. Saat ini daya perekat sosial masyarakat semakin menurun, sehingga rentan terjadi konflik yang bernuansa kekerasan. Realitas kehidupan sosial masyarakat dalam keberagaman seringkali diwarnai dengan berbagai letupan konflik yang dilatarbelakangi oleh pribumi-pendatang, mayoritas-minoritas, dan perbedaan suku maupun agama. Ketika bangsa kita masih menilai mayoritas merupakan prioritas dan penghormatan terhadap keberagaman itu sendiri tidak akan pernah terjadi<sup>99</sup>. Ketika gerakan separatist maupun konflik antar etnis

<sup>97</sup> Gatot: Internet Salah Satu Sarana Berkembangnya Radikalisme. <https://republika.co.id/berita/q5pczm354/gatot-internet-salah-satu-sarana-berkembangnya-radikalisme>. diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 18.42 WIB

<sup>98</sup> Iman Fauzi Ghifari. *Radikalisme Di Internet*. Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, 2 (Maret 2017): 123-134

<sup>99</sup> Suhardi Alius. *Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, NO. 1, 2016



maupun antar agama muncul, disinilah negara akan menghadapi masalah dengan komitmen kebangsaan yang dibentuk. Tidak dipungkiri pengaruh globalisasi yang membuat batasa negara menjadi seakan akan tidak ada membuat komitmen kebangsaan menjadi terkikis yang ditandai dengan konflik etnis maupun agama yang selalu muncul, bahkan gerakan separatisme belum benar-benar bisa hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia.

**a. Hambatan dalam mengantisipasi pengaruh globalisasi.**

Masih terdapat hambatan maupun tantangan yang dihadapi untuk menghadang derasnya laju globalisasi. *Pertama*, derasnya informasi yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber dan media, tidak diikuti oleh budaya literasi dari masyarakat. Mayoritas orang Indonesia sering hanya membaca berita dari *headline* atau judul saja kemudian langsung membagikan di media sosial. Kemampuan literasi ini menjadi tantangan bersama semua pihak; *Kedua*, para pengguna dan pengakses media sosial sering kali tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Sering kali media sosial digunakan sebagai sarana propaganda dan menyebar ujaran kebencian untuk menciptakan disintegrasi; *Ketiga*, tugas dan fungsi badan siber yang dibentuk oleh Pemerintah belum bisa sepenuhnya menangkal berbagai pengaruh buruk yang menyusup melalui internet; *Keempat*, migrasi ataupun masuknya warga negara asing ke Indonesia dengan budaya maupun latar belakang politik dan ekonomi yang berbeda, membuat arus pertukaran informasi sering kali tidak terawasi; *Kelima*, kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia yang masih belum merata, membuat tidak semua orang dapat bijak dalam menerima informasi dan menggunakan teknologi.

**b. Upaya untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi.**

- 1) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berbagai pihak yang terkait, menyusun kurikulum pendidikan karakter yang bisa menumbuhkembangkan karakter bangsa, karena dengan pendidikan karakter akan menjadi kunci utama untuk dapat melahirkan kembali generasi muda yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, ataupun guna meningkatkan nasionalisme terhadap generasi muda pada era globalisasi.



- 2) Pemerintah memperkuat peran, posisi maupun tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara agar mampu melindungi segenap komponen bangsa dari pengaruh negatif yang ada di dunia maya dengan mengawasi penggunaan media sosial oleh masyarakat melalui patroli dunia maya, maupun menutup/memblokir situs atau media sosial yang membahayakan persatuan bangsa.
- 3) Pemerintah melalui Kemenpora merangkul anak muda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan dengan menyediakan ekosistem yang baik untuk pengembangan kreativitas generasi muda.

#### **14. Meningkatkan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang berjalan secara konsisten menjadi harapan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apabila hukum sudah benar-benar menjadi “panglima”, maka tidak ada lagi orang yang akan mempertanyakan kredibilitas lembaga penegakan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi hingga saat ini, apa yang menjadi harapan dari banyak orang itu belum bisa benar-benar terwujud. Masih banyak permasalahan yang menyangkut hukum hingga saat ini belum mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum akan menjadi “panglima” ketika semua elemen masyarakat termasuk lembaga penegakan hukum dengan sungguh-sungguh memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan tolok ukur bangsa ini menjadi maju atau mundur. Penegakan hukum yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan membuat masyarakat tidak lagi mempertanyakan perlakuan hukum terhadap berbagai kasus hukum yang dianggap memihak kepada salah satu pihak, hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum menjadi tinggi dan akan menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi juga. Namun apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan juga semangat nasionalisme di masyarakat akan rendah juga. Hal ini bisa diartikan juga bahwa apabila kita ingin mempererat komitmen kebangsaan di antara anak bangsa di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, maka harus

diimbangi dengan memberikan keadilan dan kepastian termasuk di dalamnya penegakan hukum di dalam setiap persoalan yang ada di masyarakat<sup>100</sup>.

Namun hingga saat ini, kondisi penegak hukum masih mendapatkan tantangan yang tidak ringan, masih banyak terjadi kasus-kasus hukum yang terkait dengan toleransi umat beragama tidak mendapatkan perhatian dari lembaga penegakan hukum. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, di masa reformasi ini, banyak kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan hubungan antar agama. Seperti pelanggaran yang terjadi terhadap para penganut Ahmadiyah, penganut Syiah, maupun pelarangan terhadap pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut, di benak kita kemudian muncul berbagai pertanyaan mengenai ke-bhineka-tunggal-ika-an yang didengungkan oleh negara kita. Berbagai rentetan kasus pelanggaran HAM ataupun pelanggaran hukum terkait intoleransi antar umat beragama yang muncul di Indonesia menjadi salah satu bukti belum ditegakkannya rasa toleransi secara keseluruhan<sup>101</sup>.

Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY mencatat terdapat 10 kasus intoleransi yang didominasi oleh kasus kebebasan berkeyakinan dan beragama di DIY du tahun 2018. Di antaranya adalah kasus pembubaran bakti sosial di Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, kemudian penyerangan Gereja St Lidwina di Sleman, penolakan atau penyerangan acara sedekah laut di Pantai Baru, Bantul, maupun penyerangan di Pengadilan Negeri Bantul terkait kasus pameran Wiji Tukul, hingga kasus terbaru pemotongan salib nisan warga Katholik di Kotagede, Jogja<sup>102</sup>. Direktur Riset Setara Institute menyampaikan bahwa penegakan hukum yang lemah adalah akar persoalan merebaknya intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pernyataan ini terkait dengan kasus pembubaran kegiatan peribadatan umat Hindu di Pajangan, Bantul. Menurut Halili, sudah seharusnya institusi pemerintah bekerja serius menangani praktik

<sup>100</sup> Subiang jesen. Peranan Penegakkan Hukum Tumbuhnya Wawasan Kebangsaan. <https://www.kompasiana.com/subiang/552c65036ea834be058b458d/peranan-penegakkan-hukum-tumbuhnya-wawasan-kebangsaan>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 15.43 WIB

<sup>101</sup> Mengusut Kasus Intoleransi di Indonesia: Siapa yang Sebenarnya Memecah-belah NKRI? <https://ksm.ui.ac.id/mengusut-kasus-intoleransi-di-indonesia-siapa-yang-sebenarnya-memecah-belah-nkri/>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 17.52 WIB

<sup>102</sup> 10 Kasus Intoleransi Bertebaran di Jogja Sepanjang 2018 <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/21/510/960243/10-kasus-intoleransi-bertebaran-di-jogja-sepanjang-2018>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 17.52 WIB

intoleransi, akan tetapi faktanya kasus tersebut tidak mendapatkan penanganan yang serius. Penegakan hukum bagi pelaku tindak intoleransi banyak yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, keberpihakan pemerintah yang tidak jelas menyebabkan masih adanya praktik intoleransi di DIY. Menurut Halili apabila penegakan hukum kasus intoleransi tidak dijalankan dengan baik, praktik-praktik intoleransi akan terjadi lagi<sup>103</sup>.

Seperti yang terjadi di Dusun Grepek Tanah Eat, Desa Greneng, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jemaah Ahmadiyah kembali mengalami penyerangan. Delapan rumah dan empat buah sepeda motor jadi sasaran amuk massa yang terjadi pada tiga waktu yang berbeda. Tidak ada nyawa yang terenggut. Akan tetapi, 24 warga mayoritas perempuan dan anak-anak dari tujuh kepala keluarga, terpaksa diungsikan ke Gedung Loka Latihan Kerja Lombok Timur. Namun pihak Kepolisian belum menindak tegas pelaku penyerangan, padahal sebelumnya ada laporan terkait ancaman keselamatan warga Ahmadiyah yang sering dilaporkan. Ketua Divisi Advokasi YLBHI, Bahrain menganggap, persoalan intoleransi beragama di Indonesia muncul bukan semata-mata karena banyaknya aturan, melainkan penegakan hukum yang tumpul<sup>104</sup>.

Kasus hukum lainnya yang memperlihatkan penegakan hukum yang tumpul adalah ketika pada Maret 2017, seorang wanita bernama Meiliana ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 156 subsidier 156a KUHP tentang penistaan agama. Sebagaimana diketahui, Meiliana adalah seorang warga Tanjung Balai, yang mengeluhkan bisingnya pengeras suara saat kumandang azan dan meminta takmir untuk mengecilkan volume pengeras suara tersebut, bukan azannya yang dipermasalahkan. Setelah melewati beberapa persidangan yang selalu dipenuhi kerumunan massa, Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa Meiliana bersalah dan menjatuhkan hukuman kurungan 1,5 tahun penjara. Selain memidanakan Meiliana, peristiwa di Tanjung Balai juga menyeret 8 (delapan) orang lainnya sebagai tersangka. Kedelapan orang itu dituntut dengan pasal yang berbeda-beda, ada yang didakwa dengan pasal pencurian, didakwa menjadi

<sup>103</sup> Kaum Intoleran Tak Dihukum, Pembubaran Ibadah Di Yogyakarta Kian Merebak <https://www.solopos.com/kaum-intoleran-tak-dihukum-pembubaran-ibadah-di-yogyakarta-kian-merebak-1030704>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 17.55 WIB

<sup>104</sup> Ronna Nirmala. Penegakan hukum belum jadi obat intoleransi beragama. <https://beritagar.id/artikel/berita/penegakan-hukum-belum-jadi-obat-intoleransi-beragama>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 19.22 WIB

provokator, sementara sisanya didakwa dengan pasal perusakan. Ironisnya, hukuman yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap para terdakwa lainnya tergolong ringan, yakni hanya berkisar 3-5 bulan penjara. Pada sidang vonis Januari 2018 silam, majelis hakim bahkan menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan, sekitar 1,5 bulan penjara dan dipotong masa tahanan. Hanya satu terdakwa yang dihukum sedikit lebih berat, yaitu vonis penjara selama 2 bulan 18 hari dipotong masa tahanan. Padahal amuk massa yang dilakukan menyebabkan Tiga vihara, delapan kelenteng, dan satu balai pengobatan di Tanjung Balai dibakar massa yang mengamuk. Tiga mobil, dua motor, serta satu becak juga tak luput dari aksi perusakan. Sebelum konflik ini, vonis ringan juga pernah dijatuhkan bagi para pelaku penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik pada 2011. Sebanyak 12 terdakwa penyerang Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, yang hanya dijatuhi hukuman antara tiga sampai enam bulan penjara, padahal di dalam peristiwa tersebut terdapat fakta tewasnya 3 (tiga) pengikut Ahmadiyah dalam penyerangan itu. Namun pada Agustus 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang malah menjatuhkan vonis terhadap anggota Ahmadiyah, Deden Sudjana, dengan hukuman penjara enam bulan. Alasan yang menjadikan Hakim menjatuhkan vonis adalah, Deden telah melakukan tindakan yang membuat warga Cikeusik resah dengan "menolak perintah polisi untuk meninggalkan lokasi tempat kejadian". Seorang peneliti, Nathanael Gratias Sumaktoyo, mengungkapkan ada dua faktor yang menjadi penyebab ringannya vonis bagi para pelaku kekerasan bermotif agama. *Pertama*, hukum di Indonesia masih multi-tafsir. Kerangka hukum semacam itu (contohnya UU ITE dan PNPS 1965), memberi celah bagi kelompok-kelompok intoleran untuk membentuk opini publik. Aparat penegak hukum pun cenderung tidak konsisten membedakan mana pelaku mana korban; Faktor berikutnya adalah relasi mayoritas-minoritas. Pelaku kasus kekerasan agama yang dihukum ringan kebanyakan berasal dari kelompok mayoritas di daerah tersebut, sedangkan korbannya dari kelompok minoritas (bisa seagama, bisa juga tidak). Dia menduga polisi akan segan menindak tegas pelaku kekerasan dari kelompok mayoritas karena takut menyulut keributan lebih luas<sup>105</sup>.

<sup>105</sup> M Faisal. Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif Agama Divonis Ringan? <https://tirto.id/mengapa-para-pelaku-kekerasan-bermotif-agama-divonis-ringan-cUJH>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 19.35 WIB

Peristiwa main hakim sendiri yang dilatari tindakan intoleransi baru-baru ini juga terjadi di Solo. Sekelompok orang mengatasnamakan Laskar Solo, mendatangi sebuah acara keluarga almarhum Habib Asegaf Al-Jufri di Solo, pada malam tanggal 8 Agustus 2020, dan memaksa pihak Tuan Rumah untuk membubarkan acara adat Midodareni, massa itu juga melakukan pengrusakan terhadap sejumlah mobil dan memukuli beberapa anggota keluarga. Hal ini adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia, terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya. Perbuatan kelompok yang menamakan diri Laskar Solo dapat dikualifikasi sebagai perbuatan kriminal yang dilarang oleh UU. Sudah seharusnya Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Solo dan Polsek setempat tidak boleh hanya sekedar membubarkan aksi kelompok yang menamakan diri sebagai Laskar Solo, tetapi harus menindak dengan tindakan Kepolisian yang tegas, tangkap dan tahan serta adili kelompok yang menamakan diri Laskar Solo. Lembaga penegakan hukum yang ada harus lebih digdaya ketika berhadapan dengan ormas intoleran maupun, mereka jangan hanya berpangku tangan berdiam diri, atau datang sesudah aksi brutal usai dan membiarkan masyarakat menjadi korban tak berdaya. Namun yang terjadi, aksi-aksi itu sering kali tidak diproses hingga ke pengadilan, tetapi selalu berujung dengan damai dan menyampingkan proses pidana. Hal inilah yang membuat kelompok radikal dan intoleran ini menjadi besar kepala dan merajalela di mana-mana, karena aparat penegak hukum terlihat tidak digdaya dan lemah menghadapi kelompok ini<sup>106</sup>.

Berbagai praktik intoleransi pada sisi lain terjadi karena ada pembiaran negara (*by omission*) atau bahkan perangkat negara terlibat aktif di dalamnya. Seperti pengusiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia di beberapa tempat yang melibatkan peran pemerintah daerah jamak terjadi. Kehadiran negara untuk menyatukan elemen suku, agama, dan kelompok keyakinan dalam satu wadah kebangsaan justru menjadi modal penting memperkuat persatuan. Jangan sampai negeri yang dibangun keringat entitas suku, agama, dan budaya yang beragam ini justru hancur lantaran negara tidak hadir dalam memberikan ruang kepada

<sup>106</sup> Petrus Selestinus. Negara Tidak Boleh Berpangku Tangan Menghadapi Ormas Laskar Solo yang Menghakimi Keluarga Habib Al-Jufri di Solo <https://beritafajartimur.com/2020/08/09/negara-tidak-boleh-berpangku-tangan-menghadapi-ormas-laskar-solo-yang-menghakimi-keluarga-habib-al-jufri-di-solo/>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 19.50 WIB



seluruh komponen sosial. Karena itu, negara harus hadir dengan melakukan pendekatan persuasif dan tidak memihak. Negara perlu terus mendorong situasi yang kondusif dan adil guna mencegah pengulangan terjadinya kasus pelanggaran beragama dan berkeyakinan<sup>107</sup>. Sehingga komitmen kebangsaan yang telah mempersatukan seluruh komponen bangsa tidak tercabik-cabik karena adanya perlakuan tidak adil yang dialami oleh beberapa golongan tertentu.

**a. Hambatan dalam meningkatkan penegakan hukum**

Dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan atau tantangan. *Pertama*, aparat negara baik di tingkat Pusat hingga Desa, dari TNI, Kepolisian, hingga Satpol PP masih sering tunduk kepada kehendak dan kepentingan kelompok intoleran yang seakan-akan merepresentasikan mayoritas; *Kedua*, peran negara yang belum berfungsi secara penuh dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan aturan hidup dalam keberagaman; *Ketiga*, kultur hukum masyarakat yang masih belum mendukung; *Keempat*, kesadaran aparat pelaksana dan penegak hukum yang masih belum memadai untuk mengimplementasikan nilai-nilai ideologis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; *Kelima*, rendahnya pemahaman masyarakat tentang toleransi beragama.

**b. Upaya untuk meningkatkan penegakan hukum**

- 1) Kepolisian melakukan peningkatan kinerja. Dengan peningkatan kinerja, diharapkan Kepolisian akan dapat bertindak secara profesional dalam menghadapi kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan tindakan intoleransi.
- 2) Pemerintah melalui Kepolisian mengeluarkan kebijakan yang seragam dalam menghadapi kasus-kasus intoleransi, sehingga dimanapun kasus intoleransi itu terjadi, penanganan nya adalah penanganan yang seragam diterapkan di semua wilayah hukum Indonesia.
- 3) Seluruh lembaga penegak hukum melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil atas mereka yang melakukan tindak pidana

<sup>107</sup> Hukum Berat Pelaku Intoleransi. Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/95192-hukum-berat-pelaku-intoleransi>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.08 WIB



dalam berbagai bentuk, sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

- 4) Pemerintah melalui Kementerian Agama maupun Pemerintah Daerah melalui Forum Umat Beragama memperkuat dialog antar umat beragama sehingga berbagai permasalahan yang timbul di antara umat beragama maupun Organisasi Kemasyarakatan dapat dibicarakan secara benar.
- 5) Pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan.
- 6) Pemerintah melalui lembaga penegak hukum melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama atau keyakinan.

## 15. Menghilangkan Ketimpangan Sosial

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan dititikberatkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan dengan maksimal segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Proses pembangunan yang dijalankan memiliki sebuah konsekuensi logis, yaitu berupa kesenjangan ataupun ketimpangan yang terjadi antar wilayah atau daerah.

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh

lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan<sup>108</sup>. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, bahwa kesenjangan ekonomi masih jadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam banyak studi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia, bahkan yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Kesenjangan ekonomi ini bom waktu bagi konflik sosial, ungkapanya<sup>109</sup>.

Seperti yang terjadi di Kota Tanjungbalai, ketika terjadi kekerasan dan konflik sosial terkait kasus Meliana. Kekerasan dan konflik sosial yang terjadi tidak semata-mata karena permasalahan intoleransi ataupun sentimen terhadap salah satu golongan masyarakat. Tetapi ada hal lain yang bisa dianalisa dari kejadian tersebut. Faktor ketimpangan ekonomi di Tanjungbalai bisa disebut sebagai faktor yang berpengaruh. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka gini ratio Kota Tanjungbalai mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2014, angka gini ratio Kota Tanjungbalai tercatat sebesar 0,290. Kemudian pada tahun 2015, angka gini ratio Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,364. Dan pada tahun 2016 angka gini ratio Kota Tanjung Balai kembali mengalami peningkatan menjadi 0,372. Bahkan angka gini ratio Kota Tanjungbalai pada tahun 2015 dan 2016 berada diatas angka gini ratio Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2015 dan 2016 angka gini ratio Sumatera Utara tercatat hanya sebesar 0,336 dan 0,319. Sedangkan pada tahun yang sama gini ratio Kota Tanjungbalai tercatat sebesar 0,364 dan 0,372. Kondisi ini menyebabkan banyak dari penduduk Tanjungbalai yang tidak mendapatkan pemerataan kesejahteraan. Kue pendapatan ekonomi tertinggi hanya dimiliki oleh segelintir orang. Seperti yang diungkapkan oleh Cramer (2005: hal-1) yang berpendapat, “hampir merupakan asumsi universal bahwa distribusi sumber daya dan kekayaan yang tidak adil akan memancing pemberontakan dengan kekerasan”. Hal yang sama dikatakan oleh Kanbur (2007: hal-5) menyatakan bahwa “tampaknya secara umum diterima bahwa kemiskinan dan ketimpangan akan mengembangbiakkan

<sup>108</sup> Prawidya Hariani RS Dan Aulia Rizky Syahputri. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>109</sup> Cak Imin: Ketimpangan Ekonomi Bisa Jadi Bom Waktu Konflik Sosial <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3943747/cak-imin-ketimpangan-ekonomi-bisa-jadi-bom-waktu-konflik-sosial>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 21.18 WIB

konflik. Secara umum, ketimpangan menciptakan rasa ketidakadilan yang merupakan inti dari kemarahan di balik setiap jenis konflik dengan kekerasan". Sehingga berdasarkan analisis diatas, dapat kita simpulkan bahwa akar persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi di Tanjungbalai bukan hanya sekedar persoalan sentimen keagamaan dan etnis, melainkan bagian dari eksek persoalan ekonomi, terutama eksek dari adanya ketimpangan yang ekstrem dan kemiskinan yang tak teratasi<sup>110</sup>.

Hal ini senada dengan yang terjadi di DKI Jakarta, berdasarkan Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran yang dikeluarkan oleh SETARA Institute, menempatkan DKI Jakarta ke dalam 10 besar kota dengan toleransi terendah. Sedangkan berdasarkan rilis resmi BPS pada September 2019, DKI Jakarta adalah 10 Provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh SMERU Research Institute, menjelaskan bahwa bahwa desa-desa yang berada di kelompok ketimpangan tinggi cenderung mengalami konflik. Hal ini menguatkan studi sebelumnya yang mencoba melihat konflik dan ketimpangan dari dua arah. Studi Tadjoeidin *et al.* (2016) mengonfirmasi bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia memicu terjadinya konflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada akhirnya, hal yang harus diwaspadai adalah konflik sosial. Tampak ada asosiasi positif antara ketimpangan ekonomi dan konflik sosial yang bisa jadi merupakan hubungan dua arah sebagaimana dikonfirmasi oleh studi sebelumnya<sup>111</sup>. Berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan sosial masyarakat, konflik sosial, dan kegaduhan politik. Coudouel, Dani, dan Paternostro (2006) menyatakan meskipun ketimpangan tidak sampai menimbulkan guncangan sosial dan politik, ketimpangan akan menimbulkan resistensi masyarakat terhadap berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sejarah juga mencatat, tanpa menafikan faktor lainnya, kerusuhan sosial 1998 juga diawali dari kenaikan

<sup>110</sup> Arjuna Putra Aldino. Ketimpangan Ekonomi Dan Konflik: Studi Kasus Tanjungbalai. <https://geotimes.co.id/opini/ketimpangan-ekonomi-dan-konflik-studi-kasus-tanjungbalai/>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 20.12 WIB

<sup>111</sup> Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Indah Nurbani, dan Ridho Al Izzati. *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia*. 2006–2016. The SMERU Research Institute. Jakarta November 2019

indeks Gini yang cukup tajam dari 0,292 (1990) menjadi 0,36 (1996)<sup>112</sup>. Bahkan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut permasalahan di Indonesia bukan radikalisme. Persoalan ekonomi disebut sebagai salah satu penyebab utamanya. Siti menilai gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius. Siti melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia, dimana angka kemiskinan dan pengangguran masih signifikan<sup>113</sup>.

Ketimpangan yang ada dan tingginya tingkat kemiskinan menjadi hambatan tersendiri bagi bangsa Indonesia ketika ingin mempertahankan komitmen kebangsaan yang sudah ada. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang masih tinggi membuat konflik sosial dengan mudah terjadi. Apabila ketimpangan tidak bisa dihapuskan, niscaya lambat laun akan membuat komitmen kebangsaan kita makin terpuruk. Akibatnya, bangsa ini kehilangan rasa keterikatan antara warga masyarakatnya, yang membuat makin sulit membangkitkan kembali komitmen kebangsaan yang pudar.

#### **a. Hambatan dalam menghilangkan ketimpangan sosial**

Hambatan yang dihadapi dalam menghilangkan ketimpangan sosial adalah, *Pertama*, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan; *Kedua*, kebijakan ekonomi Indonesia yang masih banyak berpihak pada sekelompok orang yang berkepentingan; *Ketiga*, tingkat pengangguran yang masih tinggi; *Keempat*, konektivitas antar wilayah yang masih rendah; *Kelima*, masih rendah dan tidak meratanya kualitas Sumber Daya Manusia di sebagian wilayah Indonesia; *Keenam*, masih maraknya tindakan korupsi baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah ataupun kalangan swasta dan masyarakat.

<sup>112</sup> Ketimpangan di Indonesia Makna dan Solusi Mengatasinya <https://mediaindonesia.com/read/detail/94143-ketimpangan-di-indonesia-makna-dan-solusi-mengatasinya>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 21.17 WIB

<sup>113</sup> LIPI: Masalah Indonesia Bukan Radikalisme, Tapi Ketimpangan Sosial Ekonomi <https://www.suara.com/news/2019/12/30/041000/lipi-masalah-indonesia-bukan-radikalisme-tapi-ketimpangan-sosial-ekonomi?page=all>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 10.45 WIB

**b. Upaya untuk menghilangkan ketimpangan sosial**

- 1) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan upaya peningkatan tax ratio dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
- 2) Pemerintah memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap para pelanggar pajak.
- 3) Pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Pemerintah melakukan pemberantasan korupsi secara masif dan tegas.
- 5) Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sungguh-sungguh agar tercipta pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan pihak terkait memberikan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin.
- 7) Pemerintah membenahi berbagai kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan dan perumahan agar mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan baik.
- 8) Pemerintah melakukan sinkronisasi antara proyek infrastruktur skala nasional dan proyek infrastruktur lokal.
- 9) Pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberikan berbagai dukungan dan fasilitas terhadap UMKM.

**16. Menghilangkan Kepentingan Politik Tertentu**

Keputusan politik yang digunakan untuk memperoleh dukungan terhadap kepentingan politik satu pihak tertentu sesungguhnya sudah jamak dilakukan, namun seiring dengan semakin merebaknya sejumlah kelompok agama intoleran, militan dan konservatif dari berbagai elemen masyarakat, kebijakan bernuansa politis yang mementingkan kepentingan satu kelompok makin marak digunakan



dan berkembang. Sejatinya hal ini biasa digunakan oleh partai politik untuk menarik kelompok masyarakat mayoritas untuk kepentingan politik, namun ketika hal itu menjadi berlebihan, maka banyak menjadi sumber konflik seperti yang kita saksikan belakangan ini.

Politik identitas dengan menggunakan SARA sebagai isu utama sebenarnya adalah satu hal baru dalam ilmu politik. Menurut peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Ubed Abdillah, politik identitas adalah sebuah perlawanan terhadap semangat pluralisme yang menentang penyeragaman dalam narasi modernisme. Penggunaan politik identitas di Indonesia menguat setelah tumbanganya Orde Baru. Penggunaan isu SARA ini telah digunakan oleh kelompok elite menjadi instrumen politik dan budaya untuk merebut kekuasaan. Munculnya narasi-narasi seperti “putra daerah” pada dasarnya juga merupakan bagian dari politik identitas yang mengandung unsur SARA. Di Aceh, misalnya, kemenangan kepala daerah bahkan sudah bisa ditentukan dengan merujuk rumus: “Rakyat Aceh hanya mendukung pejuang asli dan bukan pejuang nasional.” Direktur Eksekutif CISS (*Center Institute of Strategic Studies*), M.D.La Ode menyampaikan bahwa kekuatan primordial di tingkatan lokal telah mampu menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal<sup>114</sup>. Pasca pemberlakuan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*. Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya telah membuktikan secara nyata betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain<sup>115</sup>.

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, pada tahun 2016 yang lalu adalah salah satunya yang menyita perhatian publik. Pada saat itu banyak umat Islam di Indonesia yang merasa marah atas ucapan Ahok yang dianggap telah menistakan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Masalah muncul ketika sebagian umat Islam beranggapan bahwa pemerintah bersikap tidak adil karena tidak serius dalam melakukan proses hukum terhadap

<sup>114</sup> *Politik Identitas Tetap Buas, Masyarakat Bawah Kena Imbas*. <https://tirto.id/politik-identitas-tetap-buas-masyarakat-bawah-kena-imbas-emEE>, diakses pada 14 April 2020 pukul 19.28 WIB

<sup>115</sup> Muhtar Haboddin. 2012. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012. Hal 117-118



Ahok, yang notabene pada saat itu merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Hal ini menyebabkan lahirnya gelombang aksi massa dalam jumlah yang sangat besar yang menuntut pemerintah untuk segera melakukan proses hukum terhadap Ahok. Pada sisi lain, Ahok yang beragama Kristen dan ber-etnis Tionghoa, dianggap sebagai representasi dari kaum minoritas di Indonesia. Fakta ini kemudian memunculkan sentimen dari sebagian kelompok masyarakat pendukung pemerintah, dengan menonjolkan identitas mereka sebagai kelompok nasionalis, dimana mereka melihat kelompok Islam telah berlaku diskriminatif kepada golongan minoritas. Dan hal ini dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang sangat mengedepankan kebhinekaan. Kelompok nasionalis ini kemudian merespon aksi massa yang dilakukan oleh kelompok Islam dengan menggelar aksi yang serupa. Dari sini, ketegangan antar kedua kelompok terus meningkat, hingga kemudian muncul praktik politik identitas di Indonesia. Praktik politik identitas ini kemudian terus berlanjut dan menghiiasi atmosfer utama kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>116</sup>.

Persoalan politik identitas tidak hanya terjadi di Ibukota ataupun di daerah dengan problem ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial-politik. Yogyakarta sebagai kota pelajar juga mengalami persoalan politik identitas. Roy Suryo dengan pernyataannya yang membela mati-matian aturan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap pelarangan tanah juga sebenarnya merupakan bagian dari melanggengkan praktik rasisme dan penggunaan politik identitas. Lagi pula, sebagaimana dipaparkan oleh dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Samsu Rizal, melalui bukunya berjudul Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia (2018), tindakan diskriminatif di Yogyakarta sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hingga saat ini, Yogyakarta hanya memperbolehkan etnis Tionghoa memiliki hak guna bangunan. Kesultanan beralasan, kebijakan itu adalah *affirmative policy* yang semestinya diberlakukan pada etnis yang terdiskriminasi. “Ini adalah salah satu diskriminasi yang paling sering dibicarakan dalam wawancara dengan responden Tionghoa di Yogyakarta,” catat Samsu<sup>117</sup>.

<sup>116</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4744879/plural-society-dan-konflik-identitas>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.45 WIB

<sup>117</sup> *Politik Identitas Tetap Buas Masyarakat Bawah Kena Imbas*. <https://tirto.id/politik-identitas-tetap-buas-masyarakat-bawah-kena-imbasmEE>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.28 WIB

Selain persoalan politik identitas seperti yang telah dijelaskan, kemunculan perda yang bernuansa diskriminatif dan intoleransi sesungguhnya menjadi ancaman bagi komitmen kebangsaan kita. Penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute di Jawa Barat dan DIY menemukan fakta bahwa dari 32 produk hukum daerah yang dikaji, 2 produk hukum daerah di Jawa Barat mendiskriminasi secara langsung (*direct discrimination*) kelompok Ahmadiyah, yaitu Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat dan Surat Keputusan Walikota Bogor No. 503/367-Huk Tentang Pembatalan Surat Keputusan No. 601/389-Pem Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Yasmin Bogor. Sementara, 1 produk hukum daerah di Yogyakarta, yaitu Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi mendiskriminasi langsung (*direct discrimination*) etnis Tionghoa. Produk hukum lainnya dalam dua area riset ini mendiskriminasi secara tidak langsung (*indirect discrimination*). Selain mengandung masalah inkonstitusionalitas, produk hukum daerah diskriminatif telah digunakan untuk melegitimasi serangkaian perilaku intoleran, mulai dari stigma sosial yang dimiliki individu, main hakim sendiri maupun kekerasan yang didukung oleh negara terhadap kelompok minoritas<sup>118</sup>.

Manokwari juga memiliki Perda yang mengandung nuansa diskriminatif, Perda itu mewajibkan kepada seluruh umat beragama di Manokwari untuk tidak melakukan aktivitas pada hari minggu saat penganut Kristiani melakukan ibadah. Selain itu Perda ini juga mengatur prosedur pendirian rumah ibadah di luar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2006. Meski begitu, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Provinsi Papua Barat, Shirley Parinussa yakin Perda injil tak akan memicu intoleransi. Menurutnya, kewajiban publik menghormati jam ibadah agama tertentu telah lebih dulu diterapkan di daerah lain. Mengomentari hal ini, SETARA Institute berpendapat bahwa, Perda berdasarkan agama kini tak lagi dibuat oleh daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika satu

<sup>118</sup> Ringkasan Eksekutif. Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik, SETARA Institute. 2019

kelompok intoleran, kelompok lain pasti juga melakukan hal serupa<sup>119</sup>. Munculnya perda-perda diskriminatif disebabkan pragmatisme politik kepala daerah. Masih ada kepala daerah yang bersedia disisipi agenda-agenda kelompok intoleran demi memastikan kemenangan di kontestasi elektoral. Kepala Daerah masih melihat hal ini sebagai kesempatan alat kampanye, dijadikan politik pencitraan. Mereka kemudian membuat perda dan mengeksploitasi prestasi dalam konteks perda religius untuk menghimpun barisan pendukung<sup>120</sup>.

Berbagai kepentingan politik yang menguntungkan satu pihak saat ini makin memprihatinkan. Sering kali kita menyaksikan berbagai berita maupun wacana serta narasi yang muncu ditengah masyarakat dengan aroma kebencian dan permusuhan. Agama yang semestinya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan serta menghadirkan kesejukan, saat ini bisa sewaktu-waktu berubah menjadi alat dan senjata yang digunakan untuk membunuh kasih sayang dan kemanusiaan. Semangat nasionalisme juga tidak luput dari pengaruh kepentingan politik ini. Nasionalisme seharusnya bisa menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kini dengan nasionalisme sempit, justru menjadi alat untuk memecah belah persatuan yang akan mengancam komitmen kebangsaan.

**a. Hambatan dalam menghilangkan kepentingan politik tertentu**

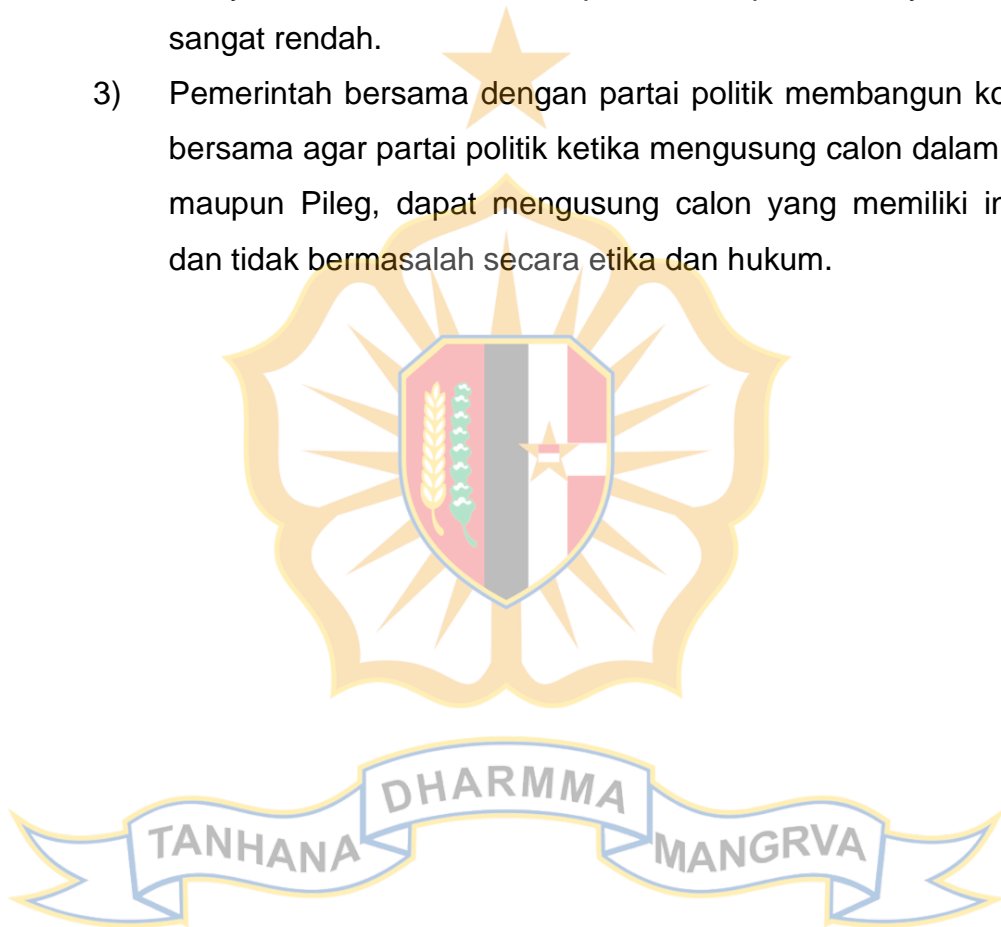
Hambatan yang dihadapi dalam menghilangkan kepentingan politik tertentu adalah, *Pertama*, masih tingginya fanatisme kelompok yang berlebihan di kalangan masyarakat, hal ini membuat mereka dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan terutama secara politik; *Kedua*, kultus terhadap individu (penghormatan secara berlebihan kepada seseorang) yang masih ada di sebagian wilayah Indonesia; *Ketiga*, rendahnya pendidikan politik mayoritas penduduk di Indonesia.

<sup>119</sup> Perda Injil Manokwari, Antara Sejarah Kekristenan dan Nuansa Intoleransi <https://news.okezone.com/read/2019/01/10/340/2002398/perda-injil-manokwari-antara-sejarah-kekristenan-dan-nuansa-intoleransi>. diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 19.45 WIB

<sup>120</sup> Fadli Mubarak. Puluhan perda di Jabar dan Yogyakarta diskriminatif <https://www.alinea.id/politik/puluhan-perda-di-jabar-dan-yogyakarta-diskriminatif-b1XkW9mxg>. diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 19.55 WIB

**b. Upaya untuk menghilangkan kepentingan politik tertentu**

- 1) Pemerintah melakukan sosialisasi untuk menanamkan dasar ideologis dan idealisme yang kuat kepada semua elemen masyarakat, khususnya bagi partai politik atau kandidat yang akan berkompetisi dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.
- 2) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan edukasi politik kepada masyarakat karena saat ini pendidikan politik masyarakat masih sangat rendah.
- 3) Pemerintah bersama dengan partai politik membangun komitmen bersama agar partai politik ketika mengusung calon dalam Pilkada maupun Pileg, dapat mengusung calon yang memiliki integritas dan tidak bermasalah secara etika dan hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **17. Simpulan**

Ketimpangan sosial di masyarakat hendaknya dapat dihilangkan dari negara kita. Telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa ketimpangan yang ada di masyarakat akan memicu terjadinya konflik. Sebagai negara dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang tersebar serta kekayaan alam maupun sumber daya manusia yang tidak merata, membuat ketimpangan di Indonesia tidak dapat dihindari. Secara umum, masyarakat yang berada di pulau Jawa mengalami kemajuan pembangunan lebih baik dibanding masyarakat di luar pulau Jawa. Perbedaan kemajuan pembangunan ini menyebabkan ketimpangan sosial yang lebar antara wilayah di pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa. Perbedaan tingkat kemakmuran dan berbagai persoalan ekonomi kerap disebut sebagai salah satu penyebab melemahnya ikatan nasionalisme di masyarakat, di mana sebagian masyarakat merasa menjadi anak tiri dari pembangunan yang dilaksanakan, sehingga mereka cenderung skeptis ketika melihat proses pembangunan dilaksanakan. Perasaan terpinggirkan inilah yang kemudian menyebabkan nasionalisme di sebagian masyarakat memudar, apabila nasionalisme masyarakat memudar maka komitmen kebangsaan yang dimiliki niscaya secara cepat akan pudar juga.

Ketimpangan yang ada dan tingginya tingkat kemiskinan menjadi hambatan tersendiri bagi bangsa Indonesia ketika ingin mempertahankan komitmen kebangsaan yang sudah ada. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang masih tinggi membuat konflik sosial dengan mudah terjadi. Apabila ketimpangan tidak bisa dihapuskan, niscaya lambat laun akan membuat komitmen kebangsaan kita makin terpuruk. Akibatnya, bangsa ini kehilangan rasa keterikatan antara warga masyarakatnya, yang membuat makin sulit membangkitkan kembali komitmen kebangsaan yang pudar.

Penegakan hukum menjadi perhatian berikutnya ketika kita ingin memperkuat komitmen kebangsaan guna mencegah intoleransi di masyarakat. Kondisi penegak hukum saat ini masih mendapatkan tantangan yang tidak ringan, masih banyak kasus-kasus hukum yang belum mendapatkan perhatian maupun

penanganan sebagaimana mestinya dari lembaga penegak hukum. Penegak hukum terkait dengan toleransi umat beragama juga sering kali tidak mendapatkan perhatian. Masih sering ditemui bahwa lembaga penegak hukum tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan toleransi umat beragama. Seharusnya lembaga penegak hukum harus lebih digdaya ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat maupun ormas yang intoleran. Jangan sampai aparat penegak hukum hanya berpangku tangan dan berdiam diri ketika ada aksi brutal yang membuat masyarakat banyak menjadi korban tak berdaya.

Penegakan hukum yang kuat merupakan salah satu tolok ukur bagi bangsa ini menjadi maju atau mundur. Apabila penegakan hukum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara benar, akan membuat masyarakat tidak lagi mempertanyakan perlakuan hukum terhadap berbagai kasus hukum yang dianggap memihak kepada salah satu pihak. Hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum menjadi tinggi dan akan menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi juga. Namun apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan juga semangat nasionalisme masyarakat akan rendah. Dengan meningkatnya nasionalisme di kalangan masyarakat, maka komitmen untuk menjadi satu bangsa akan tetap kuat mengakar di masyarakat.

Selain menghilangkan ketimpangan dan meningkatkan penegakan hukum, kondisi yang menjadi perhatian untuk meningkatkan komitmen kebangsaan adalah adanya kepentingan politik tertentu yang tumbuh di masyarakat. Berbagai kepentingan politik yang menguntungkan satu pihak saat ini makin memprihatinkan. Sering kali kita menyaksikan berbagai berita maupun wacana serta narasi yang muncul di tengah masyarakat dengan aroma kebencian dan permusuhan. Agama yang semestinya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan serta menghadirkan kesejukan, saat ini bisa sewaktu-waktu berubah menjadi alat dan senjata yang digunakan untuk membunuh kasih sayang dan kemanusiaan. Semangat nasionalisme juga tidak luput dari pengaruh kepentingan politik. Nasionalisme seharusnya bisa menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kini dengan nasionalisme sempit justru menjadi alat untuk memecah-belah persatuan yang akan mengancam komitmen kebangsaan.



Penguatan identitas tersebut muncul apabila identitas yang dikonsepsikan untuk mewadahnya dirasa tidak dapat mewakili atau menyatukan kelompok-kelompok tersebut. Sering kali penguatan identitas ini merupakan sebuah isu yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kelompoknya. Isu yang dibangun sarat makna dan sangat mengkhawatirkan bukan hanya membuat proses demokrasi lokal akan terancam, tetapi juga menjadi petunjuk memudarnya semangat nasionalisme.

Apabila politik identitas digunakan secara berlebihan dan dimanipulasi untuk target-target politik serta membenturkan identitas dengan para pihak, tentunya akan menumbuhkan perasaan eksklusif antara kelompok satu dengan lainnya berdasarkan etnis atau kepercayaan tertentu. Praktik meghalalkan segala cara saat ini kerap digunakan demi meraih kemenangan. Inilah yang menjadi kegelisahan bangsa kita dalam bernegara hari ini, karena fenomena politik identitas yang diaktualisasikan secara sempit dan negatif di ruang publik dapat menjadi ancaman bernegara, dan kemudian mendorong gejala disintegrasi yang pada gilirannya akan menggerus komitmen kebangsaan di masyarakat.

Satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam meningkatkan komitmen kebangsaan adalah derasnya arus globalisasi. Gencarnya laju globalisasi banyak membuat anak muda saat ini menjadi lebih individualis, mereka menjadi semakin cuek dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Hal seperti ini memperlihatkan bahwa secara tidak langsung nilai persaudaraan maupun nilai-nilai nasionalisme semakin tergerus dari kehidupan anak muda Indonesia. Penggunaan media sosial di internet juga sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan propaganda radikalisme, padahal saat ini hampir semua orang menggunakan internet, terutama media sosial. Kelompok-kelompok itu menggunakan berbagai media sosial untuk melakukan penyebaran pemikiran, dorongan, bahkan melakukan perekrutan anggota kelompoknya. Generasi muda sebagai kelompok yang paling banyak menggunakan internet adalah kelompok yang paling mudah terpapar dan terpengaruh dengan berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Mereka kerap kali menggunakan informasi yang diterimanya sebagai pembenaran terhadap berbagai tindakan yang mengarah kepada perpecahan bangsa, sekalipun informasi yang diterimanya belum dipastikan kebenarannya. Saat ini juga ditemukan bahwa banyak kalangan yang

menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian, hujatan, hasutan, informasi hoax, maupun paham radikal. Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya media sosial sebagai simbol kebebasan mengakses informasi digunakan secara negatif yang dapat merusak persatuan bangsa.

Pengaruh globalisasi yang saat ini mendera, membuat ikatan sosial di masyarakat semakin melemah. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi, falsafah hidup bangsa dan dasar negara semakin terkaburkan dari sendi kehidupan bangsa. Melemahnya ikatan sosial ini membuat konflik bernuansa kekerasan rentan terjadi. Realitas kehidupan sosial masyarakat dalam keberagaman sering diwarnai berbagai letupan konflik yang berlatar belakang mayoritas-minoritas, pribumi-pendatang, perbedaan suku maupun agama. Ketika gerakan separatis, konflik antar etnis maupun antar agama muncul, di sinilah negara akan menghadapi masalah dengan komitmen kebangsaan yang dibentuk. Tidak dipungkiri pengaruh globalisasi yang membuat batasan negara menjadi seakan-akan tidak ada, membuat komitmen kebangsaan menjadi terkikis yang ditandai dengan konflik etnis maupun agama yang selalu muncul, bahkan gerakan separatisme belum benar-benar bisa hilang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini dibutuhkan sebuah strategi yang tepat untuk bagaimana memperkuat jati diri bangsa Indonesia maupun memperkuat identitas kebangsaan, sehingga rasa bangga memiliki Indonesia tetap terpatri di seluruh jiwa masyarakat dan bangsa Indonesia. Apabila hal itu bisa terwujud, maka komitmen kebangsaan yang kita miliki akan semakin kuat sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga.

## 18. Rekomendasi

Untuk mendukung berbagai upaya agar seluruh langkah dalam memperkuat komitmen kebangsaan dapat dioperasionalkan sesuai dengan tujuan, maka diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang mendukung 7 agenda RPJMN 2020-2024, terutama agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas dan agenda mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Hal ini dilakukan agar pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara yang ada di seluruh wilayah NKRI tanpa ada masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam proses pembangunan nasional.

- b. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden maupun Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi bagi Seluruh Pejabat Negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar membangun komitmen bersama untuk menunjukkan perilaku yang tidak menonjolkan egosentris, perilaku menjunjung tinggi nasionalisme maupun menunjukkan perilaku yang mentaati hukum, sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi generasi muda.
- c. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional yang bertujuan untuk membangun sebuah gerakan bersama guna memperkuat kembali komitmen kebangsaan serta mengajak para elit bangsa dan masyarakat melaksanakan kehidupan yang beretika dan berbudaya sesuai nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan menjunjung tinggi semangat nasionalisme.
- d. Pemerintah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan berbagai Perda diskriminatif yang ada, sehingga budaya toleransi tetap tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia sehingga mampu meningkatkan komitmen kebangsaan dengan menjunjung kebhinnekaan.
- e. Pemerintah secara konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Karena dalam "UU Ormas" ini sudah dijelaskan mengenai hak Ormas (Pasal 20), kewajiban Ormas (Pasal 21) dan hal-hal yang dilarang dilakukan Ormas (Pasal 59). Di mana dalam UU Ormas ini, salah satu kewajiban Ormas adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi:

- Anderson, Benedict. 2001. *Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- BPS. 2020. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hariani RS, Prawidya dan Aulia Rizky Syahputri. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Indah Nurbani, dan Ridho Al Izzati. 2019. *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Printina, Brigida Intan. 2019. *Merawat Memori Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Jurnal:

- Alius, Suhardi. 2016. *Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, NO. 1.
- Boty, Middy. 2017. *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang*. JSA Vol 1 No 2 2017.
- Ghifari, Iman Fauzi. *Radikalisme Di Internet*. Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, 2 (Maret 2017).
- Haboddin, Muhtar. 2012. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012.
- Jaya, Andi Chandra. 2019. *Konsep Nation-State Dalam Pemikiran Ideologi Politik Melayu Islam Pada Abad Ke-19 M (Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munshi (1787-1854))*. Jurnal TAPIS Vol. 15 No.01 Januari – Juni 2019.
- Kusumawardani, Anggraeni & Faturochman. 2004, *Nasionalisme*. Buletin Psikologi. Tahun XII. No. 2, Desember 2004.

- Muhridin, Ansir, Sinarwaty. 2019. *Pengaruh Kemampuan Kerja, Komitmen Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal Manajemen, Bisnis dan Organisasi (JUMBO). JUMBO Vol. 3, No.1, April 2019.
- Ni'mah, Evayatun. 2017. *Pandangan Nasionalisme Dalam Puisi Maḥmūd Darwisy Dan Rendra Dalam Analisis Sastra Banding*. Jurnal Humaniora Volume 2, Nomor 1, September 2017.
- Nurhaidah, M. Insya Musa. 2015. *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar. Vol. 3 No. 3, April 2015.
- Rahayu, Mustaghfiroh. 2017. *Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2.
- Ruslan, Idrus. 2013. *Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama*. Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013.
- Wijaya, Daya Negri. 2016. *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke*. Jurnal Sosial Pendidikan Humanis Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Wirasaputri, Hj. Nina Mirantie. 2017. *Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara.



### Sumber Lain:

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2018. Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia.
- Dwi Sulisworo, Tri; Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. 2012. *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Hibah Pembelajaran Non Konvensional*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta & Bandung Raya Setara Institute, Jakarta 24 Mei 2016.
- Prosiding Konferensi Infid Kabupaten/Kota HAM 2017 Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan melalui Perluasan Kabupaten/Kota HAM. Jakarta, 6 - 8 Desember 2017.
- Ringkasan Eksekutif. 2019. *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik*. SETARA Institute.
- Setara Institute. Laporan Survei Tentang Persepsi Siswa SMU Negeri Di Jakarta & Bandung Terhadap Toleransi. Setara Institute, 30 Maret 2015.
- 10 Kasus Intoleransi Berlebaran di Jogja Sepanjang 2018  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/21/510/960243/10-kasus-intoleransi-berlebaran-di-jogja-sepanjang-2018>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 17.52 WIB
- Abdul Rivai Ras. 15 November 2018. *Politik Identitas dan Ancaman dalam Bernegara*. <https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/politik-identitas-dan-ancaman-dalam-bernegara-1542284278883209081>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.25 WIB
- Arjuna Putra Aldino. Ketimpangan Ekonomi Dan Konflik: Studi Kasus Tanjungbalai. <https://geotimes.co.id/opini/ketimpangan-ekonomi-dan-konflik-studi-kasus-tanjungbalai/>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 20.12 WIB
- Arus Globalisasi dan Berkembangnya Teknologi Menggerus Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan kata Suhardi. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/09/arus-globalisasi-dan-berkembangnya-teknologi-menggerus-rasa-nasionalisme-dan-kebangsaan-kata-suhardi>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB

- Cak Imin: Ketimpangan Ekonomi Bisa Jadi Bom Waktu Konflik Sosial  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3943747/cak-imin-ketimpangan-ekonomi-bisa-jadi-bom-waktu-konflik-sosial>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 21.18 WIB
- Empat Isu Ini Ancam Keamanan Global?. <https://www.wartaekonomi.co.id/read168001/empat-isu-ini-ancam-keamanan-global.html>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.25 WIB
- Estro Dariatno Sihalo. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/340554267>. diakses pada 14 Juni 2020 pk.21.20 WIB
- Fadli Mubarak. Puluhan perda di Jabar dan Yogyakarta diskriminatif  
<https://www.alinea.id/politik/puluhan-perda-di-jabar-dan-yogyakarta-diskriminatif-b1XkW9mxg>. diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 19.55 WIB
- Gatot: Internet Salah Satu Sarana Berkembangnya Radikalisme.  
<https://republika.co.id/berita/q5pczm354/gatot-internet-salah-satu-sarana-berkembangnya-radikalisme>. diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 18.42 WIB.
- Hoax Ancam Keamanan Nasional, Platform Medsos Harus Tanggung Jawab.  
<https://www.viva.co.id/digital/digilife/1130507-hoax-ancam-keamanan-nasional-platform-medsos-harus-tanggung-jawab>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.10 WIB
- <https://kbbi.web.id/komitmen>. diakses pada 25 Mei 2020 pukul 21.57 WIB
- <https://kbbi.web.id/toleran>. diakses pada 25 Mei 2020 pukul 19.30 WIB
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>. diakses pada 13 April 2020 pukul 11.50 WIB
- <https://news.detik.com/kolom/d-4744879/plural-society-dan-konflik-identitas>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.45 WIB
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/24178/wapres-tantangan-sekarang-ekonomi-dan-komitmen-kebangsaan/0/berita>. diakses pada 13 April 2020 pukul 13.30 WIB.
- Hukum Berat Pelaku Intoleransi. Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/95192-hukum-berat-pelaku-intoleransi>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.08 WIB.

Imparsial: Intoleransi Muncul Karena Negara Sering Absen.  
<http://www.imparsial.org/publikasi/berita/imparsial-intoleransi-muncul-karena-negara-sering-absen/>. diakses pada 20 Mei 2020 pukul 19.25 WIB

Inilah Daftar Perda Syariah yang Berlaku di Beberapa Provinsi di Indonesia.  
<https://www.islampos.com/inilah-daftar-perda-syariah-yang-berlaku-di-beberapa-provinsi-di-indonesia-115167/>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.23.45 WIB

Isky Fatimah. Pengaruh Media Sosial dalam Penyebaran Konten Propaganda Radikal. <https://www.kompasiana.com/iskyfatihmah7229/5d96dd720d823027842f4942/pengaruh-media-sosial-dalam-penyebaran-konten-propaganda-radikal?page=all>. diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB

Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.36 WIB

Jumlah Penduduk Indonesia 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.28 WIB

Kaum Intoleran Tak Dihukum, Pembubaran Ibadah Di Yogyakarta Kian Merebak  
<https://www.solopos.com/kaum-intoleran-tak-dihukum-pembubaran-ibadah-di-yogyakarta-kian-merebak-1030704>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 17.55 WIB

Ketimpangan di Indonesia Makna dan Solusi Mengatasinya  
<https://mediaindonesia.com/read/detail/94143-ketimpangan-di-indonesia-makna-dan-solusi-mengatasinya>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 21.17 WIB

LIPI: Masalah Indonesia Bukan Radikalisme, Tapi Ketimpangan Sosial Ekonomi  
<https://www.suara.com/news/2019/12/30/041000/lipi-masalah-indonesia-bukan-radikalisme-tapi-ketimpangan-sosial-ekonomi?page=all>. diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 10.45 WIB

Luthfia Ayu Azanella. *Kronologi Ricuh Wamena, Penyebab, Dampak, Hingga Tanggapan Presiden*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/>

061500065/kronologi-ricuh-wamena-penyebab-dampak-hingga-tanggapan-presiden?page=1. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.35 WIB

M Faisal. Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif Agama Divonis Ringan? <https://tirto.id/mengapa-para-pelaku-kekerasan-bermotif-agama-divonis-ringan-cUJH>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 19.35 WIB

Mahfud MD: Problem Kebangsaan Indonesia, Lemahnya Penegakan Hukum dan Keadilan, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/07/mahfud-md-problem-kebangsaan-indonesia-lemahnya-penegakan-hukum-dan-keadilan>. diakses pada 28 Juni 2020 pukul 10.45 WIB

Mengusut Kasus Intoleransi di Indonesia: Siapa yang Sebenarnya Memecah-belah NKRI? <https://ksm.ui.ac.id/mengusut-kasus-intoleransi-di-indonesia-siapa-yang-sebenarnya-memecah-belah-nkri/>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 17.52 WIB

Menilik Gerakan Tanpa Pemimpin #BlackLivesMatter di Amerika. <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/12/105519/menilik-gerakan-tanpa-pemimpin-blacklivesmatter-di-amerika>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.07 WIB

Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>. diakses pada 1 Juli 2020 pk.22.25 WIB

Muhamad Wildan. Membedah Ketimpangan di Tengah Covid-19. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200405/9/1222787/membedah-ketimpangan-di-tengah-covid-19>. diakses pada 11 Juni 2020 pk.23.45 WIB

Munculkan Efek Jera, Pelaku Intoleransi Harus Ditindak Tegas <https://www.vivanews.com/berita/nasional/39470-munculkan-efek-jera-pelaku-intoleransi-harus-itindak-tegas?medium=autonext>. diakses pada 26 Juni 2020 pukul 22.15 WIB.

Pelaku intoleransi kebal hukum, bikin kasus pembubaran ibadah merajalela di jogja <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/13/510/1024645/pelaku-intoleransi-kebal-hukum-bikin-kasus-pembubaran-ibadah-merajalela-di-jogja>. diakses pada 25 Juni 2020 pukul 21.45 WIB

Peneliti LIPI Ungkap Korelasi Media Sosial dan Intoleransi. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/12/05/>

[pj8toz320-peneliti-lipi-ungkap-korelasi-media-sosial-dan-intoleransi](#). diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 18.35 WIB

Perda Injil Manokwari, Antara Sejarah Kekristenan dan Nuansa Intoleransi <https://news.okezone.com/read/2019/01/10/340/2002398/perda-injil-manokwari-antara-sejarah-kekristenan-dan-nuansa-intoleransi>. diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 19.45 WIB

Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.05 WIB

Petrus Selestinus. Negara Tidak Boleh Berpangku Tangan Menghadapi Ormas Laskar Solo yang Menghakimi Keluarga Habib Al-Jufri di Solo <https://beritafajartimur.com/2020/08/09/negara-tidak-boleh-berpangku-tangan-menghadapi-ormas-laskar-solo-yang-menghakimi-keluarga-habib-al-jufri-di-solo/>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 19.50 WIB

*Politik Identitas Tetap Buas Masyarakat Bawah Kena Imbas*. <https://tirto.id/politik-identitas-tetap-buas-masyarakat-bawah-kena-imbasmEE>. diakses pada 14 April 2020 pukul 19.28 WIB

Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah Ibadah. <https://tirto.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJeE>, diakses pada 21 Mei 2020 pukul 13.25 WIB

Protes Black Lives Matter Gerakkan Aktivis Papua di Indonesia <https://www.matamatapolitik.com/protes-black-lives-matter-gerakkan-aktivis-papua-di-indonesia-new/>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.14 WIB

Ronna Nirmala. Penegakan hukum belum jadi obat intoleransi beragama. <https://beritagar.id/artikel/berita/penegakan-hukum-belum-jadi-obat-intoleransi-beragama>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 19.22 WIB

Subiang jesen. Peranan Penegakkan Hukum Tumbuhnya Wawasan Kebangsaan. <https://www.kompasiana.com/subiang/552c65036ea834be058b458d/peranan-penegakkan-hukum-tumbuhnya-wawasan-kebangsaan>. diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 15.43 WIB

Survei: Pesan Intoleransi Bertebaran di Media Sosial. <https://tirto.id/survei-pesan-intoleransi-bertebaran-di-media-sosial-cfeY>. diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 20.35 WIB

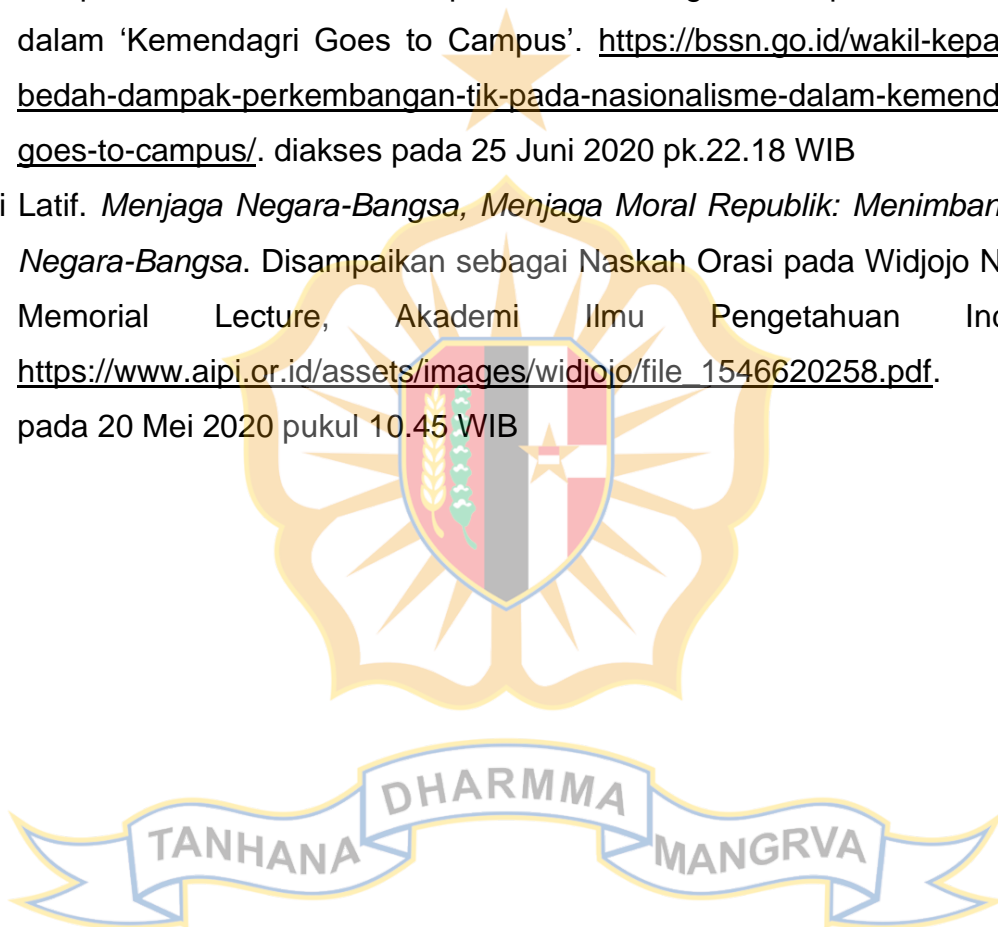


Taufik Fajar. Angka Kemiskinan Bisa Bertambah 3,78 Juta Orang akibat Covid-19. <https://economy.okezone.com/read/2020/04/14/20/2198912/angka-kemiskinan-bisa-bertambah-3-78-juta-orang-akibat-covid-19>. diakses pada 10 Juni 2020 pk.21.20 WIB

Tindak Tegas Pelaku Intoleransi Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/289740-tindak-tegas-pelaku-intoleransi>. diakses pada 26 Juni 2020 pukul 22.05 WIB.

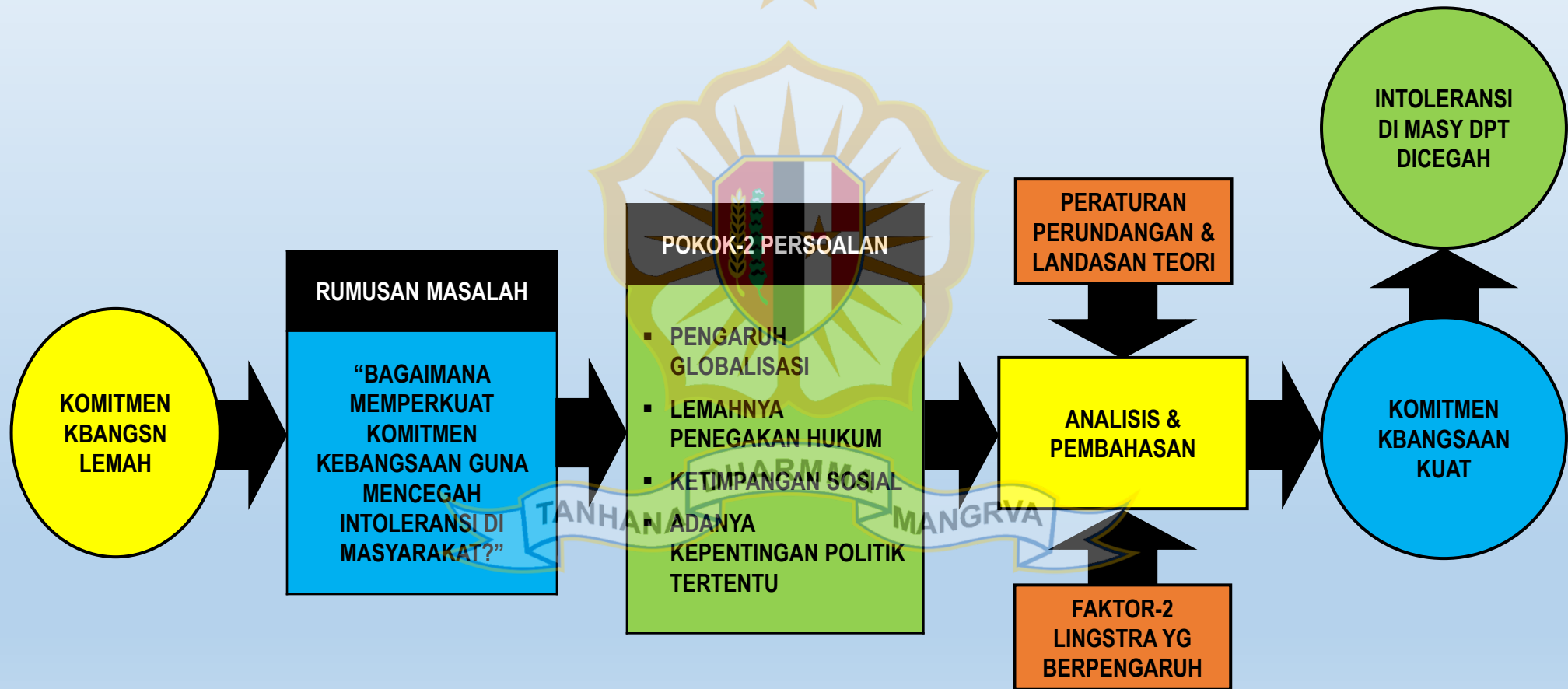
Wakil Kepala BSSN Bedah Dampak Perkembangan TIK pada Nasionalisme dalam 'Kemendagri Goes to Campus'. <https://bssn.go.id/wakil-kepala-bssn-bedah-dampak-perkembangan-tik-pada-nasionalisme-dalam-kemendagri-goes-to-campus/>. diakses pada 25 Juni 2020 pk.22.18 WIB

Yudi Latif. *Menjaga Negara-Bangsa, Menjaga Moral Republik: Menimbang Ulang Negara-Bangsa*. Disampaikan sebagai Naskah Orasi pada Widjojo Nitisastro Memorial Lecture, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. [https://www.aipi.or.id/assets/images/widjojo/file\\_1546620258.pdf](https://www.aipi.or.id/assets/images/widjojo/file_1546620258.pdf). diakses pada 20 Mei 2020 pukul 10.45 WIB



# ALUR PIKIR TASKAP

## MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN GUNA MENCEGAH INTOLERANSI DI MASYARAKAT



## RIWAYAT HIDUP SINGKAT



### I. DATA POKOK

Nama	TATANG SUBARNA	Agama	ISLAM
Pangkat	KOLONEL   Korp   INF	Gol. Darah	A
Nrp / Nip	11930072160769	Sumber Pa	AKMIL
Tempat/Tgl. lahir	SUMEDANG / 16-07-1969	TMT	27-07-1993
TMT TNI	24-07-1993	Jabatan	PABAN IV/BINWATPERS SPERSAD
Kategori	AKTIF	TMT Jabatan	29-06-2018
TMT. Kategori	24-07-1993	Satuan	DENMA MABESAD
Suku Bangsa	SUNDA	Psi	B ( STAF OPS, STAF REN )

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### PENDIDIKAN UMUM

No	Jenis Pendidikan	Tahun	Nama Pendidikan/Jurusan/Fakultas/Prodi	Prestasi
1	SEKOLAH DASAR	1982		
2	SMP	1985		
3	SMA	1988		
4				
5				
6				
7				
8				

#### PENDIDIKAN MILITER

No	Dikma/Diktuk/Dikbangum	Tahun	Prestasi	No	Dikbangspes/Dikjab/Dikilpengtek	Tahun	Prestasi
1	SUSSARCAB INFANTRI	1994		1	LAT SAR PARA	1994	
2	SUSLAPA INF	2001		2	LAT KOMANDO	1995	
3	SESKOAD	2007		3	SUS SPES DAKIBU	1995	
4				4	PJD	1997	
5				5	SUSPA SENBAN	2000	
6				6	SUS FREE FALL	2001	
7				7	SUS PANDU UDARA	2001	
8				8	SUS DAN YON	2009	
9				9	DIK DANDIM	2011	
10				10			
11				11			
12				12			

### III. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI

No	Nama Operasi	Tahun	Prestasi
1	OPS TIM-TIM	1994	
2	OPS IRJA	1995	
3	OPS ACEH	2003	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

### IV. RIWAYAT TANDA JASA

No	Tanda Kehormatan
1	S L KESETIAAN VIII TAHUN
2	S L KESETIAAN XVI TAHUN
3	S L KESETIAAN XXIV TAHUN
4	SATYA LENCANA GOM IX
5	S.L. DHARMA NUSA
6	S.L. SEROJA
7	S.L. WIRA NUSA
8	S.L. WIRA DHARMA
9	S.L. KSATRIA YUDHA
10	S.L. DWIDYA SISTHA
11	S.L. KEBHAKTIAN SOSIAL
12	BINTANG KARTIKA EKA PAKCI NARARYA
13	SATYA LENCANA GOM VII

### V. KEMAMPUAN BAHASA

No	Daerah	Aktif
1	SUNDA	AKTIF
2		
3		
4		
5		
No	Asing	PASIF
1	INGGRIS	PASIF
2		
3		
4		
5		
6		

### VI. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat	TMT	Nomor Kep/Skep
1	LETD	27-07-1993	KEP/49/ABRI/1993
2	LETTU	01-10-1996	KEP/3231X/1996
3	KAPTEN	01-10-1999	KEP/5441X/1999
4	MAYOR	01-10-2004	KEP/3081X/2004
5	LETKOL	01-10-2009	KEP/16351X/2009
6	KOLONEL	01-04-2015	SKEP/614/XI/2014
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

### VII. RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI

No	Macam Tugas	Tahun	Negara	Prestasi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				



## VIII. RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	TMT	No	Jabatan	TMT
1	WADANTIM-2 DEN-1 YON-11 GRUP-1	01-07-1994	18		
2	DANTON-1 KI-1 YON-13 GRUP-1	01-09-1996	19		
3	DANKI-2 YON-13 GRUP-1 KOPASSUS	01-02-1998	20		
4	DANSUS GLG GRUP 3 PUSDIKPASSUS	01-02-2000	21		
5	KASI JIANBANG PUASIKPASSUS	01-09-2002	22		
6	DANSUSKO SATDIK PUSDIKPASSUS	01-05-2004	23		
7	DANDENMA PUSDIKPASSUS KOPASSUS	01-04-2005	24		
8	PAMEN KOPASSUS (DIK SESKOAD)	15-02-2007	25		
9	PS PBDYA BINPERS SPERSDAM XVII/CEN	05-11-2007	26		
10	PBDYABINPERS SPERSDAM XVII/CEN	01-12-2008	27		
11	DANYONIF 751/BS DAM XVII/CEN	15-05-2009	28		
12	DANDIM 1705/PANIA REM 171/PVB DAM XVII/CEN	28-03-2011	29		
13	PABANDYA-1/BINSIAP APWIL SPABAN-III/PUANTER STERAD	27-03-2012	30		
14	ASPERS KASDAM XVII/CENDERAWASIH	13-11-2014	31		
15	KABIDJIANBANG STRAOPS SDIRBINJIANBANG	28-06-2016	32		
16	PABAN IV/BINWATPERS SPERSAD	29-06-2018	33		
17			34		

## IX. RIWAYAT KELUARGA

Status	KAWIN	No.	Nama Anak	Tgl Lahir
Jml Anak	2	1	FARHAN DAFFA PAUZANA	1-8-1999
Alamat Tinggal	PERUM KORPRI RT 02 RW 05 DESA SAYANG KEC JATINANGOR	2	FARHANA DAFFA FAUZITA	15-2005
Nomor HP	082238151993	3		
Nama Ayah	IKIN RASIKIN (ALM)	4		
Nama Ibu	INO ARYANI	5		
Alamat Orang Tua	PERUM KORPRI RT 02 RW 05 DESA SAYANG KEC JATINANGOR	6		
Nama Istri/Suami	LILIS AGUSNIANI	7		

## X. RIWAYAT PRESTASI

No	Kegiatan	Tahun	Tempat	Deskripsi	KEP/Piagam
1	GPS TIM-TIM	1999/1999	TIM-TIM	GAP TOKOH AN MAU BANU & 1 PUCUK FNC	KEP KASAD NOMOR/169/IV/1997 TGL 17-4-1997
2	LOMBA BINSAT	2011	JAYAPURA	PASCA DEMO ANGGOTA YONIF 751/BS SENTANI/ JAYAPURA YON TERBAIK	PIALA/TROPHY, PIAGAM (SATUAN)
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Mengetahui :

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2019



Yang bersangkutan,

[Signature]  
Tatang Subarna  
Kolonel Inf NRP 11930072160769